

PENGUNGKAPAN INFORMASI AIR
(Studi Kasus pada Perusahaan *High Profile* di Kawasan Asia Tenggara)



Nama: Egadia Birru Rakaitadewa
No. Mahasiswa: 16312353

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

PENGUNGKAPAN INFORMASI AIR
(Studi Kasus pada Perusahaan *High Profile* di Kawasan Asia Tenggara)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan



Nama: Egadia Birru Rakaitadewa

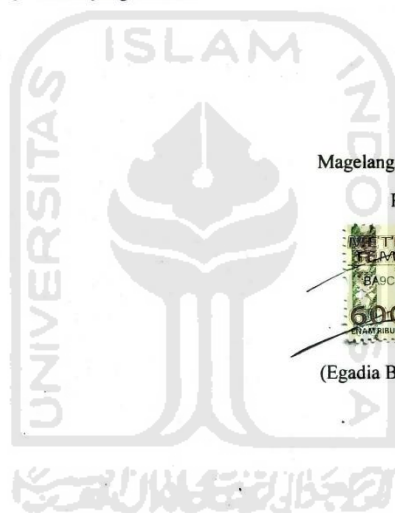
No. Mahasiswa: 16312353

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Magelang, 31 Agustus 2020

Penulis,



(Egadia Birru Rakaitadewa)

PENGUNGKAPAN INFORMASI AIR
(Studi Kasus pada Perusahaan *High Profile* di Kawasan Asia Tenggara)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Egadia Birru Rakaitadewa
No. Mahasiswa: 16312353

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 31 Agustus 2020
Dosen Pembimbing,



(Fitra Roman Cahaya, SE., M.Com., Ph.D., CSRS, CSRA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGUNGKAPAN INFORMASI AIR (STUDI KASUS PERUSAHAAN HIGH PROFILE DI
KAWASAN ASIA TENGGARA**

Disusun Oleh : **EGADIA BIRRU RAKAITADEWA**

Nomor Mahasiswa : **16312353**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Rabu, 14 Oktober 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Fitra Roman Cahaya ,S.E., M.Com., Ph.D., CSRS., CSRA.**

Penguji : **Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.App.Com., M.Res., Ak., Ph.D.**

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, **SE., M.Si., Ph.D.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Nikmat terluhur meruap dalam dada atas perintah Allah swt. untuk selalu menelusuri lapisan-lapisan cahaya, cahaya di atas cahaya, yaitu Allah itu sendiri. Sebuah metode yang, secara tersirat, tak lepas dari suatu penelitian; proses mencari dan terus mencari.

Puji dan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad saw., seorang “peneliti” sejati yang presisi dalam membuat keputusan, luas dan dalam cara pandangnya, jangkak cara pikirnya dan lain-lain.

Skripsi ini terselesaikan tentu tidak menafikan dorongan, bimbingan, doa dan energi dari berbagai pihak. Maka, penulis hendak mengatarkan terima kasih, sembari terus mencari kata atau laku yang lebih dalam dari “terima kasih”, kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak., Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Fitra Roman Cahaya, SE., M.Com., Ph.D., CSRS, CSRA, dosen pembimbing skripsi yang melimpahkan energi, dorongan, bimbingan dan saran;
5. Seluruh staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang membekali ilmu dari berbagai disiplin dan sudut pandang;

6. Kedua orang tua dan keluarga besar atas rupa-rupa dukungan dan cinta dan kasihnya;
7. Dr. Gutomo Priyatmono, direktur IMPULSE dan pemilik Anomie Coffee, yang memberikan pemikiran-pemikiran kritisnya;
8. Bandung Mawardi dan Purwadmadi, kedua orang yang menjadi rujukan penulis menyelesaikan skripsi ini;
9. Fajar Maulana Ahmad, seseorang yang telah mencapai kesejatian hidup;
10. Guru-guru dan teman-teman yang mungkin tidak bisa tersebut satu per satu.



Magelang, 31 Agustus 2020

Penulis,

Egadia Birru Rakaitadewa

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir / Skripsi	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN	6
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 LANDASAN TEORI.....	8
2.1.1 Teori Institusional	8
2.1.1.1 Tekanan Koersif	8
2.1.2 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	9
2.1.2.1 Pengungkapan CSR.....	12
2.1.3 <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI)	14
2.1.4 Pengungkapan Standar Khusus Pengungkapan Informasi Air dalam Laporan CSR	14
2.2 PENELITIAN TERDAHULU.....	16

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN	22
2.3.1 Keberadaan Komite CSR	22
2.3.2 Independensi Dewan	23
2.3.3 Kepemilikan Pemerintah	23
2.3.4 Operasi Internasional	25
2.3.5 Variabel Kontrol	26
2.4 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 POPULASI DAN SAMPEL	28
3.2 JENIS DATA DAN SUMBER DATA	28
3.3 VARIABEL PENELITIAN	28
3.3.1 Variabel Dependen	28
3.3.2 Variabel Independen	31
3.3.2.1 Keberadaan Komite CSR	32
3.3.2.2 Independensi Dewan	33
3.3.2.3 Kepemilikan Pemerintah	34
3.3.2.4 Operasi Internasional	35
3.3.2.5 Variabel Kontrol	36
3.4 TEKNIK ANALISIS DATA	37
3.4.1 Statistik Deskriptif	37
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	38
3.4.2.1 Uji Normalitas	38
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas	38
3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas	39
3.4.3 Analisis Regresi Berganda	39
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Verifikasi Data	41
4.2 Data dan Pembahasan Hasil Penelitian	41

4.2.1 Statistik Deskriptif	41
4.2.1.1 Statistik Deskriptif pada Variabel Independen.....	41
4.2.1.2 Statistik Deskriptif pada Variabel Kontrol	47
4.2.1.3 Statistik Deskriptif pada Variabel Dependen	49
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	51
4.3.1 Uji Normalitas.....	51
4.3.2 Transformasi Variabel untuk Uji Asumsi Klasik.....	53
4.3.3 Hasil Uji Normalitas setelah Transformasi Variabel	53
4.3.4 Uji Multikolinearitas	54
4.3.5 Uji Heterokedastisitas	54
4.4 Analisis Regresi Berganda.....	55
4.5 Interpretasi Hasil Analisis Regresi Berganda Tiap Variabel	57
4.5.1 Keberadaan Komite CSR.....	58
4.5.2 Independensi Dewan.....	59
4.5.3 Kepemilikan Pemerintah.....	60
4.5.4 Operasi Internasional	62
4.5.5 Variabel Kontrol	63
BAB V SIMPULAN.....	65
5.1 Simpulan	65
5.2 Implikasi Penelitian	67
5.3 Keterbatasan Penelitian	70
5.4 Saran	70
DAFTAR REFERENSI.....	71
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu	19
3.1 Metode Pengukuran Variabel Independen	31
3.2 Metode Pengukuran Keberadaan Komite CSR dalam Penelitian Terdahulu ..	32
3.3 Metode Pengukuran Independensi Dewan dalam Penelitian Terdahulu	33
3.4 Metode Pengukuran Kepemilikan Pemerintah dalam Penelitian Terdahulu..	34
3.5 Metode Pengukuran Operasi Internasional dalam Penelitian Terdahulu	35
3.6 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan dalam Penelitian Terdahulu	36
3.7 Metode Pengukuran Kinerja Ekonomi dalam Penelitian Terdahulu	37
4.1 Statistik Deskriptif Keberadaan Komite CSR	42
4.2 Statistik Deskriptif Independensi Dewan	43
4.3 Independensi Dewan Tiap Negara.....	44
4.4 Statistik Deskriptif Kepemilikan Pemerintah	44
4.5 Statistik Deskriptif Operasi Internasional	46
4.6 Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan.....	47
4.7 Ukuran Perusahaan Tiap Negara	48
4.8 Statistik Deskriptif Kinerja Ekonomi	48
4.9 Kinerja Ekonomi Tiap Negara.....	48
4.10 Statistik Deskriptif Jumlah Kata.....	49
4.11 Jumlah Kata yang Berhubungan dengan Air.....	50
4.12 Jumlah Kata Pengungkapan Air	51
4.13 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov.....	52
4.14 Uji Normalitas Pascatransformasi Variabel	53
4.15 Hasil Uji Multikolinearitas	54
4.16 Hasil Uji Heterokedastisitas	54
4.17 Hasil Analisis Regresi Berganda	55
4.18 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis	57
5.1 Rangkuman Simpulan Penelitian	66

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	27
4.1 Frekuensi Keberadaan Komite CSR Tiap Negara.....	42
4.2 Frekuensi Kepemilikan Pemerintah Tiap Negara.....	45
4.3 Frekuensi Operasi Internasional dalam Tiap Negara	47
4.4 Jumlah Kata Air menurut Kualifikasi GRI-303	51



DAFTAR LAMPIRAN

1.1: Daftar Perusahaan High Profile di Indonesia	76
1.2: Daftar Perusahaan High Profile di Malaysia	76
1.3: Daftar Perusahaan High Profile di Thailand	77
1.4: Daftar Perusahaan High Profile di Filipina	78
2.1: Checklist Laporan Tahunan dan Keberlanjutan di Indonesia	79
2.2: Checklist Laporan Tahunan dan Keberlanjutan di Malaysia	79
2.3: Checklist Laporan Tahunan dan Keberlanjutan di Thailand.....	80
2.4: Checklist Laporan Tahunan dan Keberlanjutan di Filipina.....	81
3.1: Data Variabel Independen di Indonesia	82
3.2: Data Variabel Independen di Malaysia	84
3.3: Data Variabel Independen di Thailand.....	85
3.4: Data Variabel Independen di Filipina	87
4.1: Data Pengungkapan Informasi Air di Indonesia	89
4.2: Data Pengungkapan Informasi Air di Malaysia	90
4.3: Data Pengungkapan Informasi Air di Thailand.....	91
4.4: Data Pengungkapan Informasi Air di Filipina	92
5.1: Data Ukuran Perusahaan di Indonesia.....	94
5.2: Data Ukuran Perusahaan di Malaysia	95
5.3: Data Ukuran Perusahaan di Thailand	96
5.4: Data Ukuran Perusahaan di Filipina.....	97
6.1: Data Kinerja Ekonomi di Indonesia	98
6.2: Data Kinerja Ekonomi di Malaysia	99
6.3: Data Kinerja Ekonomi di Thailand	100
6.4: Data Kinerja Ekonomi di Filipina	101

ABSTRACT

This study investigates the extent of water reporting by 40 high-profile companies in Southeast Asia and examines the influences of coercive factors on the level of water disclosures over the reporting periods of 2016, 2017, and 2018. Global Reporting Initiative 303 is adopted as the disclosure benchmark for measuring the extent of water disclosures in annual reports and sustainability reports. The findings reveal that level of high-profile companies' water disclosures in Indonesia, Malaysia, Thailand and Philippine companies are low (43.39 per cent). The existences of Corporate Social Responsibility (CSR) committees and international operations are associated with the level of disclosure in a positive direction. Government ownership and, surprisingly, independence of board are not significant determinants of water reporting. One of the control variables in this research, company size, is also found positively significant. Despite the initiatives or conventions that has been undertaken by international organizations to preserve the environment (or water obviously), the level of water disclosure is different across the four countries under this study. This study is the first study which scrutinizes the associations between coercive factors and the level of water disclosures in Southeast Asia.

Keywords: *water, disclosures, Southeast Asia, coercive pressures*

ABSTRAK

Skripsi ini menginvestigasi tingkat pelaporan air di 40 perusahaan *high profile* di kawasan Asia Tenggara dan menguji pengaruh faktor-faktor koersif terhadap tingkat pengungkapan informasi air untuk periode pelaporan 2016, 2017, dan 2018. *Global Reporting Initiative 303* diadopsi sebagai acuan pengungkapan untuk mengukur tingkat pengungkapan informasi air dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Hasil menunjukkan tingkat pengungkapan informasi air perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina adalah sekitar 43 kata. Keberadaan komite CSR dan operasi internasional berhubungan positif dengan pengungkapan informasi air. Kepemilikan pemerintah dan, secara mengejutkan, independensi dewan tidak signifikan atas pelaporan informasi air. Salah satu variabel kontrol, ukuran perusahaan, juga ditemukan signifikan dengan arah yang positif. Walaupun prakarsa atau konvensi telah digelar organisasi internasional untuk melindungi lingkungan (air), tingkat pengungkapan informasi air berbeda-beda tiap negara. Studi ini merupakan yang pertama kali meneliti hubungan antara faktor-faktor koersif dan tingkat pengungkapan informasi air di Asia Tenggara.

Kata Kunci: air, pengungkapan, Asia Tenggara, tekanan koersif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Krisis lingkungan belum menjadi sorotan utama untuk pencarian atau pembahasan solusinya. Pembahasan dominan pada pertumbuhan ekonomi, minim pertimbangan dampak-dampaknya. Air, dari sekian instrumen lingkungan di Bumi ini, mengalami krisis berskala global. Walaupun, menurut Joe Barnett, peneliti geografi politik dari Universitas Melbourne, perubahan kondisi alam tidak melahirkan konflik secara langsung, tetapi “memperburuk keadaan” (Dermawan, 2019).

Krisis air banyak dihubungkan dengan polusi. Artikel dari The Asean Post berjudul “Southeast Asia’s stream of polluted rivers” melaporkan polusi sungai di kawasan Asia Tenggara. Lima sungai tercatat terpapar polusi: Sungai Citarum di Indonesia, Sungai Kinabatangan di Malaysia, Sungai Irrawady di Myanmar, Sungai Chao Phraya dan Mekong di Thailand dan Sungai Marilao di Filipina. Yasmin Rasyid, ahli biologi dan ketua Ecoknight, mengatakan bahwa air sungai tercemar limbah organik dan padat, polusi logam berat, tambang pasir ilegal dan pembangunan yang buruk di sepanjang tepian sungai (The Asean Post, 2019).

Limbah-limbah itu merupakan imbas peningkatan populasi, urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan iklim (Geall, 2019). Selain tercemar, berdampak pada kelangkaan air dan menjadi tempat penampungan berbagai macam bahan polutan (Pink, 2016).

Tak hanya The Asean Post, beberapa media warta lain berhasil merekam pencemaran sungai di Asia Tenggara berbentuk artikel atau video—yang berimplikasi pada krisis air.¹ Rekaman menayangkan aktivitas sektor industri penyumbang terbesar pencemaran sumber daya air. Padahal, kondisi ini akan menghambat perkembangan ekonomi (Zhou, dkk., 2018)², tak terkecuali industri itu sendiri.

Namun, publik telah menyadari perlindungan lingkungan, sehingga sering diadakan diskusi publik dan perusahaan atau korporat menjadi sorotan utama pembicaraan (Zhou, dkk., 2018). Negara, sebagai pengawas dan penegak aturan, tentu tidak luput dari perbincangan, yang kadang—alih-alih sering—menutup mata atas praktik-praktik nakal perusahaan.

John Ruggie, pengajar Hak Asasi Manusia dari Universitas Havard, merumuskan tiga prinsip bertema bisnis dan Hak Asasi Manusia (Prinsip Ruggie), yang kemudian diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pilar ketiga menyebutkan bahwa perusahaan harus menyediakan pemulihan sosial dan lingkungan atas dampak yang ditimbulkan “melalui mekanisme negara (yudisial dan nonyudisial), mekanisme nonnegara, atau mekanisme lain” (Fuad, 2019).

Pengungkapan informasi air bisa masuk kategori mekanisme lain dari Prinsip Ruggie. Pengungkapan ini memperlihatkan seberapa besar kepedulian perusahaan

¹ Lihat artikel National Geographic (www.nationalgeographic.com/news/2018/03/vietnam-mekong-illegal-sand-mining/), Vice Indonesia (www.vice.com/id/article/j5jw9p/menelusuri-sungai-mekong-melihat-krisis-kemanusiaan-akibat-tambang-pasir), dan video dokumenter “War For Water: What Happens When Asia’s Rivers Dry Up?” oleh CNA Insider (www.youtube.com/watch?v=oL-ejX7GLA) (diakses 28 Oktober 2020)

² Dalam artikel “The impact of water information disclosure on the cost of capital: An empirical study of China’s capital market” (2018).

terhadap lingkungan sekitar, di sisi lain mampu melegitimasi eksistensi dan membenahi citra perusahaan. Ini penting untuk lingkungan eksternal perusahaan, yakni para *stakeholder* (pemerintah, investor atau masyarakat) yang fokus pada isu lingkungan imbas aktivitas perusahaan (Zhou, dkk., 2018).

Pencantuman informasi lingkungan bisa dilihat dalam laporan *corporate social responsibility* (CSR) atau keberlanjutan perusahaan. Laporan CSR terhimpun dalam laporan tahunan (*annual report*) yang juga berisi laporan keuangan perusahaan selama periode satu tahun berjalan. Laporan yang menjembatani kepentingan antara perusahaan dan para *stakeholder* (Putra, 2016).

Penelitian pengungkapan informasi lingkungan tumbuh subur menambah khasanah literatur akuntansi lingkungan. Namun, penelitian pengungkapan informasi air—sebagai salah satu komponen lingkungan—belum signifikan (Zhou, dkk., 2018)³. Atau perusahaan tidak mengungkap informasi ini dalam laporan CSR, seperti penelitian Zhou dkk (2018) di Cina yang mendapati perusahaan di sana sedikit atau bahkan tidak merilis informasi air karena masih cukup baru sehingga *stakeholder* tidak mempertimbangkan pelampiran informasi air. Atau sebenarnya para *stakeholder* tahu perusahaan terkait tidak mampu mengatasinya dan sengaja menyembunyikan realitanya (Zhou, dkk., 2018).

Penelitian pengungkapan informasi air bisa dilihat dalam Hazelton (2013); Burritt dkk (2016); Zhou dkk (2018); Zeng dkk (2019); Talbot dan Barbat (2019); dan Yu, Kuo dan Ma (2020). Namun, penelitian-penelitian ini tidak spesifik

³ Dalam artikel “Does water disclosure cause a rise in corporate risk-taking? –evidence from Chinese high water-risk industries.

mengungkap informasi air dan lokasinya di luar kawasan Asia Tenggara⁴. Kesenjangan literatur ini akan ditutup melalui penelitian yang penulis ajukan tentang tingkat pengungkapan informasi air dan faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan informasi air. Perusahaan *high profile*⁵ di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina dipilih berdasarkan artikel The Asean Post di atas. Pengecualian untuk Myanmar karena, saat penelitian ini ditulis, hanya enam perusahaan yang tercatat dalam Yangon Stock Exchange⁶. Dan hanya satu perusahaan yang memenuhi kualifikasi *high profile*, yaitu Myanmar Thilawa SEZ Holdings—yang bergerak dalam bidang konstruksi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Latar belakang di atas menguraikan permasalahan dalam ranah praktik dan kesenjangan literatur dalam akuntansi lingkungan. Penelitian ini akan mengidentifikasi kuantitas pengungkapan informasi air dan pengaruh keberadaan komite CSR, independensi dewan, kepemilikan pemerintah dan operasi internasional terhadap tingkat pengungkapan informasi air dalam perusahaan-perusahaan *high profile* di empat negara. Pertanyaan penelitian yang timbul atas kesenjangan literatur tersebut adalah sebagai berikut.

⁴ Termasuk kedua artikel dari Zhou dkk. (2018)

⁵ Tipe perusahaan *high profile* merujuk pada aktivitas perusahaan yang berdampak besar pada aspek sosial dan lingkungan yang memengaruhi *stakeholder* (Cahaya dan Hervina, 2019). Perusahaan *high profile* bergerak dalam bidang perkebunan, tambang, kimia, garmen dan tekstil, transportasi, dan lain-lain. Perusahaan keuangan, jasa, investasi dan asuransi tidak masuk klasifikasi *high profile*.

⁶ Yangon Stock Exchange baru dibentuk pada Desember 2015 dan dibuka pada Maret 2016 (lihat www.asia.nikkei.com/Business/Markets/Myanmar-s-stock-market-cracks-open-door-to-foreigners). Sampai sekarang, aktivitas perdagangan saham dalam masa kritis. Penyebabnya regulasi yang rumit dan sikap Myanmar atas krisis kemanusiaan yang menimpa kelompok etnis Rohingya (lihat www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-16/myanmar-has-just-five-stocks-now-it-wants-another-equity-market).

1. Bagaimana tingkat pengungkapan informasi air di perusahaan-perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina?
2. Apakah keberadaan komite CSR memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina?
3. Apakah independensi dewan memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina?
4. Apakah kepemilikan pemerintah memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina?
5. Apakah operasi internasional memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi tingkat pengungkapan informasi air pada perusahaan-perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.
2. Mengidentifikasi pengaruh keberadaan komite CSR terhadap tingkat pengungkapan informasi air pada perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.

3. Mengidentifikasi pengaruh independensi dewan terhadap tingkat pengungkapan informasi air pada perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.
4. Mengidentifikasi pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap tingkat pengungkapan informasi air pada perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.
5. Mengidentifikasi pengaruh operasi internasional terhadap tingkat pengungkapan informasi air pada perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk:

- 1.1 Masyarakat, yaitu sebagai sarana pemahaman, advokasi, diskusi dan lain-lain tentang kondisi sumber daya air kiwari akibat industrialisasi.
- 2.1 Peneliti, yaitu sebagai pengembangan ilmu dengan penyigian dari beragam sudut pandang.
- 3.1 Akademisi, yaitu sebagai rujukan pengembangan ilmu dalam tataran teoritik maupun praktik dengan memperhatikan lingkungan atau kelas sosial yang terkena dampak paling parah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini tertulis dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Penguraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penguraian landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian-penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian yang akan dilakukan dan kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Penjelasan penentuan sampel, populasi data, jenis data, sumber data dan metode pengumpulan data. Pendeskripsian variabel-variabel penelitian juga terhimpun dalam bab ini.

BAB IV: DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penjelasan objek penelitian, analisis data menggunakan alat-alat statistika dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN

Penyimpulan hasil penelitian beserta implikasinya, keterbatasannya dan sarannya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Institusional

Pengaplikasian teori institusional dalam penelitian ini diharap mampu menjelaskan situasi perusahaan akibat tekanan institusional untuk mengungkapkan informasi air (DiMaggio dan Powell 1983; Sari, Cahaya, dan Joseph 2020). Tekanan yang mampu menyuguhkan alasan perusahaan mengungkap informasi air dan bagaimana representasi informasi itu terhadap tindakan perusahaan (Higgins dan Larrinaga 2014).

Deegan (2017) membagi teori institusional dalam dua cabang: *decoupling* dan *isomorphism*. Jika disesuaikan dengan topik penelitian, *decoupling* adalah komparasi laporan informasi air dan realitas di perusahaan untuk mengetahui keabsahan laporan yang dilakukan organisasi lain. Sementara, *isomorphism* adalah tekanan-tekanan institusional dari *stakeholder* kepada perusahaan untuk mengungkap informasi air (Cahaya dkk. 2012). DiMaggio dan Powell (1983) membagi *isomorphism* menjadi tiga: koersif, mimetik, dan normatif.

2.1.1.1 Tekanan Koersif

Koersif merujuk pada tindakan perusahaan merespon tekanan institusional (misal, mengungkap informasi air dalam CSR) dari

stakeholder yang berpengaruh atas kegiatan bisnis perusahaan (DiMaggio dan Powell; Cahaya dkk. 2012). Bentuk tekanan koersif *stakeholder* bisa berupa lobi politik, regulasi, pedoman, dan lain-lain. Perusahaan harus merespon tekanan ini agar legitimasi bisnisnya tetap atau semakin kuat (DiMaggio dan Powell 1983). Penelitian ini berusaha mengidentifikasi apakah tingkat pengungkapan informasi air terpengaruh oleh sumber-sumber tekanan koersif berikut: keberadaan komite CSR, independensi dewan, kepemilikan pemerintah dan operasi internasional.

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Kotler dan Nancy (2005, hal, 3) mendefinisikan CSR sebagai “komitmen perusahaan memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan komunitas di sekitar melalui praktik bisnis yang baik dan pendistribusian sumber daya perusahaan.” Sementara, Fernandez-Gago dkk. (2014) melihat CSR adalah usaha pengontrolan risiko sosial dan lingkungan untuk meredam ancaman yang sewaktu-waktu datang.

Indonesia mewajibkan aktivitas CSR, atau tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dalam bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 ayat 1. Kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah No. 47/2012. Namun, kedua aturan itu tidak memuat informasi standar dan sanksi pengabaian aktivitas CSR. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-VI/2008 atas hak uji materi UU No. 40/2007 yang pernah dilayangkan memutuskan

[...] TJSL/CSR secara implisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (sektoral) yang lainnya, seperti antara lain: Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Sumber daya Air serta Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi [...] ⁷

Atas putusan tersebut, Andrina (2016) menyatakan bahwa peraturan CSR ini tidak terarah karena berhubungan dengan peraturan lain.

Corporate citizenship dan *corporate governance* adalah terminologi yang diasosiasikan dengan CSR di Thailand. *Corporate citizenship* mengacu pada aktivitas korporat yang berkontribusi positif dalam suatu lingkup sosial dan meminimalisasi dampak negatifnya. Sementara, *corporate governance* meliputi komitmen korporat atas transparansi, praktik yang bermoral dan etis dan aksentuasi pada *stakeholder* dalam pengelolaan manajemen korporat. Penguatan *corporate governance* di Thailand semakin penting pasca-krisis ekonomi 1997 menghantam Asia Tenggara. Maka, setelah National Corporate Governance Committee (NCGC) terbentuk pada 1998, bersama pemerintah setempat, standar *corporate governance* terumuskan agar bisa diimplementasi oleh perusahaan-perusahaan Thailand (Rajanakorn 2012).

Konsep dan praktik CSR baru dipromosikan oleh The Stock Exchange of Thailand (bursa efek Thailand) melalui pembentukan Corporate Social

⁷ Dikutip dari L. Andrina, "Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia", *Mimbar Hukum* Vol. 28, No. 3 (Oktober 2016): 512-525

Responsibility Institute pada 2007. Konsep dan praktik mencakup isu sosial dan lingkungan di tengah geliat bisnis Thailand, baik untuk organisasi sektor publik maupun privat (Rajanakorn 2012). Pengembangan CSR juga ditempuh melalui lokakarya dan penghargaan bagi perusahaan yang menunjukkan kinerja positif ketika melakukan program CSR.

Pengembangan CSR di Malaysia telah dirintis melalui penerbitan Undang-undang Kualitas Lingkungan (1974), Undang-undang Antikorupsi (1977), dan Undang-undang Komisi Hak Asasi Malaysia (1999) (Lu dan Castka 2009). Baru pada 2004, berdasarkan Rencana Strategis Nasional Malaysia, dibentuk Institut Integriti Malaysia untuk mempromosikan praktik CSR untuk perusahaan publik maupun privat. Organisasi nirlaba lain seperti Malaysian Institute of Corporate Governance, Komite Putrajaya dan Bursa Malaysia juga merilis inisiatif-inisiatif bertopik CSR (Nasir dkk 2015).

Konsep CSR mungkin belum menggemakan pada 1970an di Filipina, tetapi ekspresinya telah ditampilkan Philippine Business for Social Progress (PBSP), organisasi nirlaba yang menyalurkan dana dan bantuan dari perusahaan publik atau privat—yang menjadi anggota PBSP—untuk program sosial dan lingkungan. Pada 1991, PBSP membentuk Center for Corporate Citizenship agar anggotanya mau berinvestasi sosial dalam jangka panjang dan beroperasi secara berkelanjutan yang tidak membahayakan lingkungan dan komunitas setempat (Mendoza 2011). Regulasi CSR *an sich* baru saja disahkan dan akan dibahas secara singkat pada subbab berikutnya.

2.1.2.1 Pengungkapan CSR

Pengungkapan CSR sebenarnya adalah pembuktian komitmen perusahaan pada isu sosial dan lingkungan yang berkelindan dalam aktivitasnya. Komitmen bisa diwujudkan melalui pengungkapan informasi, seperti kondisi kesehatan tenaga kerja, inisiatif pemberantasan korupsi di lingkungan internal, konservasi air sungai, penutupan kolam tambang dan lain-lain. Transparansi informasi tersebut membangun atau mengokohkan legitimasi perusahaan di hadapan *stakeholder*.

Pengungkapan CSR, atau laporan keberlanjutan, di Indonesia termaktub dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Namun, spesifikasi instrumen yang harus diungkapkan oleh suatu institusi tidak ada. Peraturan hanya memuat kaidah-kaidah teknis-administratif seperti tenggat waktu pelaporan dan institusi yang harus melapor. Pengenaan sanksi bagi pelanggar aturan juga hanya berupa teguran atau peringatan tertulis.

Transparansi informasi oleh suatu korporasi Thailand diawali Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand pada 2002 yang mempromosikan prinsip *good corporate governance*, salah satunya, yaitu transparansi. Transparansi itu berupa informasi

keuangan dan nonkeuangan. Laporan CSR tergolong kategori yang disebut terakhir. Selang dua belas tahun, komisi tersebut mewajibkan perusahaan publik mengungkapkan kebijakan dan aktivitas CSR dalam sebuah laporan (Issarawornrawanich dan Wuttichindanon, 2018).

Pengungkapan CSR di Malaysia diinisiasi dua institusi dalam warsa yang sama. Pada 2006, Pemerintah Malaysia mewajibkan perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham mengungkapkan informasi CSR dalam laporan tahunan pada akhir periode fiskal 31 Desember 2007. Sementara, Bursa Malaysia merilis kerangka CSR sebagai acuan perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan, yaitu komunitas, lingkungan, tempat kerja dan lokapasar (Othman dkk., 2011).

Tidak seperti ketiga negara lain yang lebih awal memiliki perangkat-perangkat pengungkapan CSR, Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina pada 15 Februari 2019 menerbitkan edaran tentang panduan pelaporan keberlanjutan untuk perusahaan yang tercatat dalam bursa saham. Edaran dipatuhi mulai 8 Maret 2019 dan dirilis dalam laporan tahunan pada 2020.

Panduan pelaporan keberlanjutan itu terdiri atas tiga topik: ekonomi, lingkungan dan sosial. Khusus topik lingkungan, perusahaan harus mengungkapkan “bagaimana perusahaan mengelola

sumber daya alam dan meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan”.⁸

2.1.3 Global Reporting Initiative (GRI)

GRI adalah organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pelaporan keberlanjutan. Organisasi ini menyediakan panduan pelaporan (*GRI Guideline*) yang berisi instrumen-instrumen pelaporan untuk topik tertentu, yang berada di bawah koridor sosial dan lingkungan.

Panduan ini memiliki kode khusus, berupa angka, untuk masing-masing topik. Topik ekonomi berkode 200, lingkungan berkode 300, dan sosial berkode 400. Penelitian ini mengadopsi panduan pelaporan bertopik lingkungan dengan fokus pada topik air—yang memiliki kode khusus juga bernomor 303.

2.1.4 Pengungkapan Standar Khusus Pengungkapan Informasi Air dalam Laporan CSR

Panduan pelaporan GRI 303 terbagi dua bagian: pengungkapan dengan pendekatan manajemen dan indikator pengungkapan informasi air. Indikator pengungkapan informasi air antara lain:

a) Pengambilan air berdasarkan sumber dengan cakupan:

i. Volume total air yang diambil bersumber dari:

⁸ A. C. Veloso & A. M. Vallada, “Philippines: SEC Releases Sustainability Reporting Guidelines”, 1 Juli 2019, <https://globalcompliancenews.com/philippines-sec-releases-sustainability-reporting-guidelines-20190522/> (diakses 20 Oktober 2020)

- Air permukaan, termasuk air dari lahan basah, sungai, danau, dan laut;
 - Air tanah;
 - Air hujan yang dikumpulkan langsung dan disimpan oleh organisasi;
 - Air limbah dari organisasi lain;
 - Pasokan air kota atau utilitas air swasta atau publik lainnya.
- ii. Standar, metodologi dan asumsi yang digunakan (Pengungkapan 303-1).
- b) Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air dengan cakupan:
- i. Jumlah total sumber air berdasar jenis:
- Ukuran sumber air;
 - Apakah sumber ditetapkan sebagai kawasan lindung secara nasional atau internasional;
 - Nilai keanekaragaman hayati (seperti keragaman spesies dan endemisme, serta jumlah total spesies yang dilindungi);
 - Nilai atau pentingnya sumber air bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat.
- ii. Standar, metodologi dan asumsi yang diperlukan (Pengungkapan 303-2).

- c) Daur ulang dan penggunaan air kembali dengan cakupan:
- i. Total volume daur ulang dan penggunaan air kembali oleh organisasi;
 - ii. Total volume daur ulang dan penggunaan air kembali sebagai persentase dari total pengambilan air sebagaimana penjelasan Pengungkapan 303-1;
 - iii. Standar, metodologi dan asumsi yang digunakan (Pengungkapan 303-3).

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa peneliti telah mengkaji pengungkapan informasi air dengan sudut pandang yang berbeda, tetapi pengungkapan informasi secara spesifik tidak ada yang meneliti. Berikut hasil penelitian-penelitian terdahulu.

Burritt dkk., (2016) meneliti pemantik perusahaan mengungkap informasi air di Jepang. Pemantik itu antara lain ukuran organisasi, sensitivitas industri terhadap air, sorotan media, kepemilikan pusat, pencatatan internasional dan profitabilitas. Seratus perusahaan yang tercatat dalam Nikkei 225 menjadi sampel penelitian. Data berupa laporan tahunan dan keberlanjutan periode 2013/2014; berupa indeks pengungkapan informasi air. Analisis konten dipakai untuk mengungkap informasi air, sementara komponen pemantik diukur menggunakan regresi linier berganda. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran organisasi, sensitivitas industri terhadap air, dan kepemilikan pusat memantik perusahaan mengungkap informasi air. Sorotan media sebenarnya memengaruhi keterungkapan, tetapi ia ditolak karena

berpotensi menumpuk informasi. Terakhir, pencatatan internasional dan profitabilitas tidak memantik pengungkapan informasi air.

Zhou dkk., (2018) dalam waktu yang sama melakukan dua penelitian yang menjadikan terminologi “pengungkapan informasi air” sebagai variabel independen. Keduanya memakai data yang sama: 334 perusahaan yang tercatat dalam China Stock Market & Accounting Research dengan tingkat sensitivitas air yang tinggi periode 2010 hingga 2015; indeks pengungkapan informasi air diambil dari laporan tahunan, CSR, dampak lingkungan (*environmental impact*) dan keberlanjutan.

Penelitian pertama menunjukkan pengungkapan informasi air tidak memengaruhi risiko manajer perusahaan atas kebijakan investasi. Tiga alasan ketidakpengaruhannya itu: i) laporan nisbi baru di Cina sehingga investor tidak memperhitungkannya sebagai pertimbangan berinvestasi (Najah, 2012 dalam Zhou dkk., 2018); ii) informasi asimetris antara perusahaan dan investor sulit direduksi karena investor cenderung fokus pada situasi untung dan rugi moneter; iii) laporan hanya untuk membuat citra terlihat baik di hadapan *stakeholder* (Zhou dkk., 2018).

Kedua, penelitian menghubungkan pengungkapan informasi air dan biaya modal. Laporan ini memengaruhi biaya modal secara gradual: ketika tingkat pengungkapan informasi rendah, biaya modal bertambah, begitupun sebaliknya.

Penempatan “pengungkapan informasi air” sebagai variabel independen juga terdapat di penelitian Zeng dkk., (2019). Para peneliti menghubungkannya dengan

risiko perusahaan (*firm risk* atau *total risk*), yang terdiri atas risiko pasar (*systematic risk* atau *market risk*) dan risiko unik (*idiosyncratic risk*). Data berupa 334 perusahaan yang tercatat dalam China Stock Market & Accounting Research dengan tingkat sensitivitas air yang tinggi periode 2010 hingga 2015; indeks pengungkapan informasi air diambil dari laporan tahunan, CSR, dampak lingkungan (*environmental impact*) dan keberlanjutan.

Penelitian menunjukkan pengungkapan informasi air tidak signifikan terhadap risiko perusahaan dan risiko unik. Menurut Zeng dkk., (2019) penyebabnya adalah pemerintah tidak mewajibkan penyertaan informasi air dan aktivitas pelaporan seperti ini nisbi baru dalam pasar modal Cina. Sifatnya pun masih sukarela, sehingga investor tidak memperhitungkannya sebagai pertimbangan berinvestasi, alih-alih lemahnya pemahaman tentang isu air.

Studi kualitatif yang mendedah strategi perusahaan dibalik pengungkapan informasi air dilakukan Talbot dan Barbat (2019). Mereka menganalisis indeks pengungkapan air dalam laporan GRI dari 58 perusahaan tambang yang tersebar di seluruh dunia pada tahun 2015. Memakai teori *impression management* sebagai pisau analisis, diperoleh empat strategi perusahaan untuk meningkatkan impresi di hadapan *stakeholder* (Talbot dan Barbat, 2019): i) ‘pengabaian’, perusahaan sengaja tidak menyertakan elemen tertentu dalam pengungkapan informasi air yang mampu memengaruhi persepsi atas performa perusahaan; ii) ‘pembiasan’, perusahaan memanipulasi informasi untuk mengaburkan makna dalam laporan; iii) ‘bertahan’, perusahaan membenarkan isu yang beredar atau mempertanyakan praktik bisnis; dan iv) ‘netralisasi’, perusahaan mengelak dari tanggung jawab atas

tuduhan perkara, melimpahkan kesalahan kepada pihak lain atau mendiskreditkan pelapor perusahaan.

Terakhir, pola penelitian milik Burritt dkk., (2016) diadopsi Yu, Kuo dan Ma (2020) dengan penyuguhan dua variabel independen yang berbeda. Variabel itu *debt ratio* dan pencatatan dalam indeks pasar modal. Walaupun, menurut penulis, variabel terakhir hanya mengubah skala pencatatan saja dari pencatatan internasional. Data yang diambil berupa laporan keuangan dan laporan informasi air dalam CDP Global Water Report tahun 2016 dari 294 perusahaan di Amerika Serikat. Yu, Kuo dan Ma (2020) menyatakan bahwa *debt ratio*, sensitivitas industri terhadap air, rasio kepemilikan *blockholder*, pencantuman dalam indeks pasar modal memengaruhi pengungkapan informasi air. Sementara, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak memengaruhi pengungkapan informasi air.

Tabel 2.1: Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Negara	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
1	Burritt dkk., (2016)	Jepang	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran organisasi • Sensitivitas industri terhadap air • Sorotan media • Kepemilikan pusat • Pencatatan internasional • Profitabilitas 	Pengungkapan informasi air	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran organisasi, sensitivitas industri terhadap air, dan pusat kepemilikan berasosiasi terhadap pengungkapan informasi air • Sorotan media sebenarnya berasosiasi dengan

					<p>pengungkapan ini, tetapi ia ditolak karena bisa berpotensi penumpukan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan internasional dan profitabilitas tidak berasosiasi dengan pengungkapan informasi air
2	Zhou dkk., (2018)	Cina	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi air • Efek moderasi dari legitimasi organisasi 	Risiko manajer perusahaan atas kebijakan investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi air tidak memengaruhi risiko atas kebijakan investasi • Efek modrasi dari legitimasi organisasi memengaruhi risiko atas kebijakan investasi
3	Zhou dkk., (2018)	Cina	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi air • Koneksi politik (official dan representative) 	Biaya modal	<p>Pengaruh informasi air terhadap biaya modal menunjukkan perubahan yang gradual: ketika tingkat pengungkapan informasi rendah, biaya modal bertambah; saat tingkat pengungkapan informasi air</p>

					tinggi, biaya modal berkurang
4	Zeng dkk., (2019)	Cina	Pengungkapan informasi air	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko pasar (<i>systematic risk</i>, <i>market risk</i>) • Risiko unik (<i>idiosyncratic risk</i>) • Total risiko (<i>total risk</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi air tidak signifikan terhadap total risiko dan risiko unik • Pengungkapan informasi air signifikan 21egative terhadap risiko pasar
5	Talbot dan Barbat (2019)	-	-	-	Perusahaan tambang cenderung merilis laporan informasi air yang tidak lengkap agar citra di depan <i>stakeholder</i> terlihat bersih
6	Yu, Kuo dan Ma (2020)	Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Debt ratio</i> • Rasio kepemilikan blockholder • Pencantuman dalam indeks pasar modal • Sensitivitas industri terhadap air • Ukuran perusahaan • Profitabilitas 	Pengungkapan informasi air	Hanya ukuran perusahaan dan profitabilitas yang tidak memengaruhi pengungkapan informasi air

Sumber: Rangkuman dari berbagai jurnal

Rangkuman penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa belum ada penelitian tentang pengungkapan informasi air perusahaan *high profile* serta determinannya di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini akan menguji empat determinasi atau sumber tekanan koersif pada pengungkapan informasi air perusahaan *high profile* di kawasan Asia Tenggara, sehingga kesenjangan literatur bisa tertutup. Penjelasan lima determinan itu dijabarkan dalam subbab selanjutnya.

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

2.3.1 Keberadaan Komite CSR

Kewenangan komite CSR dalam internal perusahaan adalah mengkaji kebijakan dan mengontrol serta mengawasi komitmen perusahaan terhadap isu keberlanjutan yang melibatkan proses pelaporan informasi sosial dan lingkungan (Michelon dan Parbonetti, 2012). Komite CSR bisa memaksa jajaran manajemen perusahaan untuk bersinergi mengkomposisikan informasi-informasi bertema air yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan.

Michelon dan Parbonetti (2012), Helfaya dan Moussa (2017), Fuente dkk., (2017) dan Gallego-Alvarez dan Pucheta-Martinez (2019) mencatat bahwa keberadaan komite CSR memengaruhi tingkat pengungkapan laporan CSR. Maka, penulis mengajukan hipotesis:

H1: *Keberadaan komite CSR berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan informasi air*

2.3.2 Independensi Dewan

Dewan direktur (direksi) atau komisaris berperan dalam pengarahan atau pengawasan aktivitas perusahaan agar sesuai kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* (Haniffa dan Cooke, 2005; Cahaya dkk., 2012). Peran direksi atau komisaris, terutama yang bersifat independen, dianggap mampu memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan yang spesifik dalam laporan CSR.

Direksi atau komisaris independen berasal dari lingkungan eksternal suatu perusahaan, sehingga diasumsikan tidak ada relasi atau konflik kepentingan antara kedua belah pihak. Semakin besar proporsi anggota independen, tekanan yang diterima perusahaan besar pula untuk merespon tekanan itu (yaitu mengungkapkan informasi air).

Htay dkk. (2012), Khan dkk. (2013) dan Pucheta-Martinez dkk. (2018) mencatat ada pengaruh proporsi anggota independen terhadap tingkat pengungkapan laporan CSR. Maka, penulis mengajukan hipotesis:

H2: Proporsi direktur atau komisaris independen berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan informasi air

2.3.3 Kepemilikan Pemerintah

Pemerintah Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina memiliki peraturan tentang pengungkapan CSR oleh perusahaan dan sumber daya air. Kedua peraturan pemerintah ini (legal; formal)—yang bersifat paksaan

(koersif)—bisa bersinergi untuk menekan (memaksa) perusahaan mengungkap informasi air dalam laporan CSR—dengan penerapan sanksi jika aturan diabaikan.

Perusahaan milik negara (*state-owned company*) berpeluang patuh dan tunduk karena jajaran direksinya adalah orang-orang pilihan dari pemerintah, alih-alih karakteristik perusahaan ini terbuka untuk publik, sehingga aktivitasnya bebas terpantau oleh siapapun. Secara umum, selain memakmurkan para pemegang saham, perusahaan dianggap harus menyanggupi kebutuhan pemerintah agar legitimasi perusahaan kuat atau stabil (Amran dan Devi, 2008).

Signifikansi pengaruh kepemilikan pemerintah atas pengungkapan laporan CSR terdokumentasi dalam Amran dan Devi (2008), Said dkk. (2009), Othman dkk. (2011) dan Ashfaq dan Rui (2018). Sementara, Cahaya dkk. (2012) justru memperoleh signifikansi itu terhadap pengungkapan informasi kelaikan dan praktik kerja—bagian dari laporan CSR—dalam perusahaan di Indonesia. Mengacu pada temuan penelitian berbasis spesifikasi konten dalam CSR, maka penulis mengajukan hipotesis:

H3: *Kepemilikan pemerintah berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan informasi air*

2.3.4 Operasi Internasional

Operasi perusahaan⁹ yang merentang hingga luar negeri mendatangkan tekanan dari *stakeholder* internasional berupa regulasi atau ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Kepatuhan itu agar mendapat legitimasi berskala global, sehingga bisnis terjamin keberlanjutannya. Khusus perusahaan-perusahaan asal negara berkembang, termasuk dari kawasan Asia Tenggara, mendapat sorotan internasional atas kegiatan destruktif sumber daya alam yang masif. Tekanan koersif bisa memaksa perusahaan mengungkap informasi lingkungan, tak terkecuali sumber daya air.

Sari dkk. (2020) mendapat temuan yang menarik tentang pengaruh operasi internasional pada tingkat pengungkapan informasi anti korupsi di Asia Tenggara. Hasil menunjukkan bahwa manajemen puncak dari perusahaan tidak merespon semua tekanan dari *stakeholder* internasional. Terjadi pemilahan *stakeholder* yang dianggap memiliki kuasa paling kuat. Berbeda jika menilik konteks satu negara saja dalam penelitian Cahaya dkk (2017), yang menemukan operasi internasional ampuh menekan tingkat pengungkapan informasi kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Walaupun hasil berbeda, intensi dunia internasional atas transparansi informasi nisbi tinggi. Maka, penulis mengajukan hipotesis:

⁹ Penulis mengklasifikasikan operasi perusahaan dalam tiga bentuk: penjualan, anak perusahaan dan kantor cabang

H4: *Operasi internasional berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan informasi air*

2.3.5 Variabel Kontrol

Ukuran perusahaan dan kinerja ekonomi menjadi variabel yang mengontrol korelasi antara variabel independen dan tingkat pengungkapan informasi air.

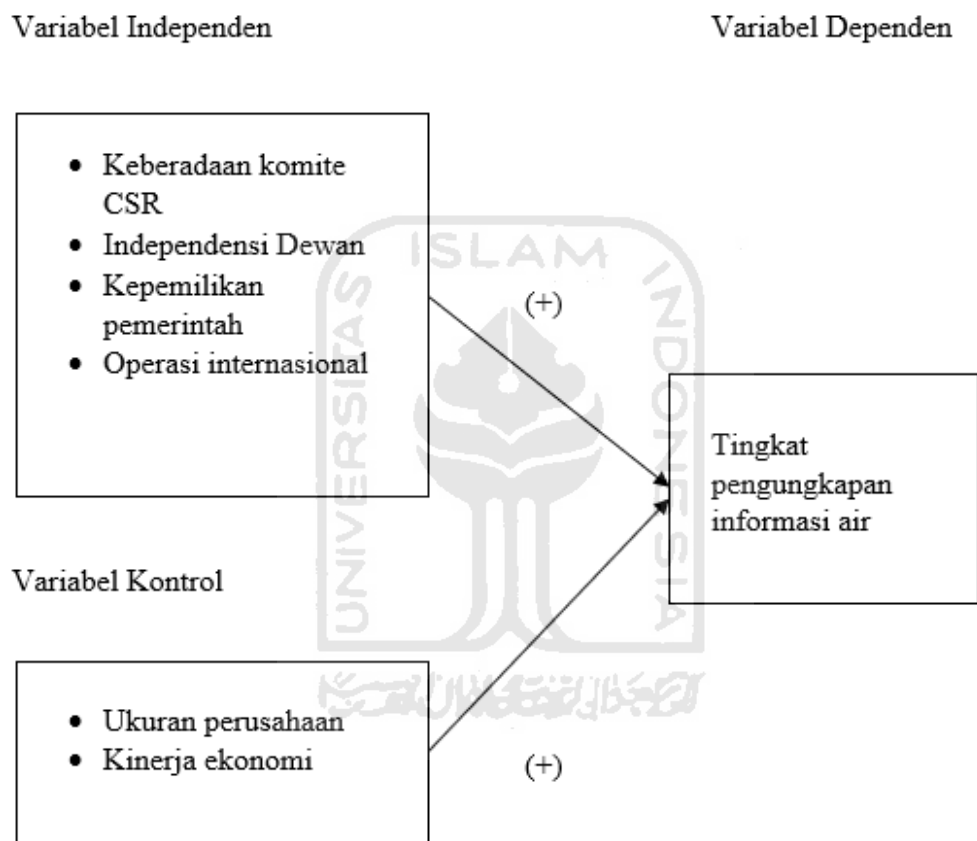
Ukuran perusahaan berasosiasi dengan kuantitas pengungkapan informasi. Tingkat pengungkapan informasi air berpotensi tinggi pada perusahaan skala besar (*high profile*) karena aktivitas bisnisnya selalu bersinggungan dengan sumber daya air.

Hal yang sama juga terjadi ketika kinerja perusahaan memuaskan. Modal finansial perusahaan yang cukup mampu membiayai keter selenggaraan program (air) tertentu dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan (Roberts 1992, dalam Cahaya dkk. 2017).

2.4 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Penelitian ini disusun oleh kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi perusahaan *high profile* yang tercatat dalam bursa efek Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina menjadi objek penelitian ini. Merujuk pada Cahaya dan Hervina (2019), industri yang termasuk *high profile* bergerak dalam bidang perkebunan, tambang, kimia, garmen dan tekstil, transportasi, dan lain-lain, kecuali jasa, investasi dan asuransi. Penulis mengambil sepuluh perusahaan yang masuk kategori *high profile* pada tiap negara secara acak. Sampel terambil sejumlah 120 laporan tahunan dan 35 laporan keberlanjutan (atau CSR) bermasa tiga periode fiskal (2016, 2017, 2018), kecuali laporan keberlanjutan Atlas Mining (Filipina) yang hanya tersedia dalam dua periode, yaitu 2017 dan 2018.

3.2 JENIS DATA DAN SUMBER DATA

Data sekunder adalah penggolongan yang tepat untuk menyebut laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan periode 2016-2018. Namun, tidak semua perusahaan merilis laporan keberlanjutan, sehingga ia opsional. Beberapa laporan tahunan diunduh dari situs web bursa efek negara masing-masing dan sisanya di situs web tiap-tiap perusahaan.

3.3 VARIABEL PENELITIAN

Penelitian ini digerakkan oleh tiga variabel, antara lain:

3.3.1 Variabel Dependen

Tingkat pengungkapan informasi air.

Tingkat pengungkapan informasi	=	Unit analisis jumlah kata
--------------------------------	---	---------------------------

Pengungkapan informasi air berdasarkan indikator Standar GRI 303 dicari dalam setiap laporan tahunan dan keberlanjutan, seperti yang telah terpapar pada bab 2. Indikator itu antara lain:

a) Pengambilan air berdasarkan sumber dengan cakupan:

i. Volume total air yang diambil bersumber dari:

- Air permukaan, termasuk air dari lahan basah, sungai, danau, dan laut;
- Air tanah;
- Air hujan yang dikumpulkan langsung dan disimpan oleh organisasi;
- Air limbah dari organisasi lain;
- Pasokan air kota atau utilitas air swasta atau publik lainnya.

ii. Standar, metodologi dan asumsi yang digunakan (Pengungkapan 303-1).

b) Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air dengan cakupan:

i. Jumlah total sumber air berdasar jenis:

- Ukuran sumber air;

- Apakah sumber ditetapkan sebagai kawasan lindung secara nasional atau internasional;
 - Nilai keanekaragaman hayati (seperti keragaman spesies dan endemisme, serta jumlah total spesies yang dilindungi);
 - Nilai atau pentingnya sumber air bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat.
- ii. Standar, metodologi dan asumsi yang diperlukan (Pengungkapan 303-2).
- c) Daur ulang dan penggunaan air kembali dengan cakupan:
- i. Total volume daur ulang dan penggunaan air kembali oleh organisasi;
 - ii. Total volume daur ulang dan penggunaan air kembali sebagai persentase dari total pengambilan air sebagaimana penjelasan Pengungkapan 303-1;
 - iii. Standar, metodologi dan asumsi yang digunakan (Pengungkapan 303-3).

Pengukuran pengungkapan informasi yang menggunakan jumlah kata sesuai dengan teknik pengukuran yang diterapkan beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan *content analysis* (lihat Soobaroyen dan Mahadeo (2016), Sari dkk (2020)). Penghitungan kata dianggap sebagai teknik pengukuran pengungkapan informasi yang lebih mudah diterapkan dengan

bantuan fungsi “copy paste” dan “penghitungan kata” dalam Microsoft Word (Rao dan Tilt, 2016).

3.3.2 Variabel Independen

Metode pengukuran variabel independen dalam penelitian ini tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.1: Metode Pengukuran Variabel Independen

Variabel	Pengukuran	Tipe Data
Keberadaan Komite CSR	1 = Ada komite CSR dalam perusahaan 0 = Tidak ada komite CSR dalam perusahaan	<i>Categorical</i>
Independensi Dewan	Persentase anggota direktur independen pada perusahaan Malaysia, Thailand, dan Filipina dan dewan komisaris pada perusahaan Indonesia ¹⁰	<i>Continuous</i>
Kepemilikan Pemerintah	1 = Ada kepemilikan saham oleh pemerintah	<i>Categorical</i>

¹⁰ Ada satu perbedaan antara struktur organisasi dalam perusahaan Indonesia dan ketiga negara lain. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur pembentukan—tentu selain dewan direksi—dewan komisaris dalam perusahaan Indonesia. Pasal 108 dalam UU tersebut menyebut dewan komisaris “melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.” Dan pihak yang ‘independen’ atau di luar dari lingkungan perusahaan berada dalam lingkup dewan komisaris, disebut komisaris independen. Sementara pihak independen di ketiga negara lain berada dalam lingkup dewan direksi/direktur, disebut direktur independen.

	0 = Tidak ada kepemilikan saham oleh pemerintah	
Operasi Internasional	1 = Ada penjualan asing, anak perusahaan asing atau kantor cabang asing 0 = Tidak ada penjualan asing, anak perusahaan asing atau kantor cabang asing	<i>Categorical</i>

Metode pengukuran di atas berdasarkan metode-metode pengukuran dalam penelitian terdahulu. Berikut ini rangkuman metode-metode pengukuran tersebut.

3.3.2.1 Keberadaan Komite CSR

Tabel 3.2: Metode Pengukuran Keberadaan Komite CSR dalam Penelitian Terdahulu

Penulis	Negara	Pengukuran
Michelon dan Parbonetti (2012)	Amerika Serikat dan Eropa	1 = Ada komite CSR dalam perusahaan 0 = Tidak ada komite CSR dalam perusahaan
Helfaya dan Moussa (2017)	Inggris	1 = Ada komite CSR dalam perusahaan 0 = Tidak ada komite CSR dalam perusahaan

Fuente dkk. (2017)	Spanyol	1 = Ada komite CSR dalam perusahaan 0 = Tidak ada komite CSR dalam perusahaan
Gallego-Alvarez dan Pucheta-Martinez (2019)	Brazil, Cile, Cina, Republik Ceko, Mesir, India, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan dan Thailand	1 = Ada komite CSR dalam perusahaan 0 = Tidak ada komite CSR dalam perusahaan

Metode pendikotomian untuk mengukur variabel komite CSR dipakai semua penelitian di atas. Maka, penulis mengadopsi metode pengukuran tersebut.

3.3.2.2 Independensi Dewan

Tabel 3.3: Metode Pengukuran Independensi Dewan dalam Penelitian Terdahulu

Penulis	Negara	Pengukuran
Htay dkk. (2012)	Malaysia	Proporsi anggota direktur independen (<i>independent non-executive directors</i>) dalam perusahaan
Cahaya dkk (2012)	Indonesia	Proporsi anggota komisaris independen (<i>independent commissioners</i>) dalam perusahaan
Khan dkk. (2013)	Bangladesh	Proporsi anggota direktur independen (<i>independent</i>

		<i>directors</i>) dalam perusahaan
Pucheta-Martinez dkk. (2018)	Spanyol	Proporsi anggota direktur independen dalam perusahaan
Cahaya dan Hervina (2019)	Indonesia	Proporsi anggota komisaris independen dalam perusahaan

Sesuai tabel 3.1, dua metode diterapkan untuk mengukur independensi dewan. Pengukuran proporsi anggota komisaris independen pada perusahaan-perusahaan Indonesia, sementara proporsi anggota direktur independen pada perusahaan-perusahaan Malaysia, Thailand, dan Filipina.

3.3.2.3 Kepemilikan Pemerintah

Tabel 3.4: Metode Pengukuran Kepemilikan Pemerintah dalam Penelitian Terdahulu

Penulis	Negara	Pengukuran
Amran dan Devi (2008)	Malaysia	Persentase kepemilikan saham pemerintah
Said dkk. (2009)	Malaysia	Persentase kepemilikan saham pemerintah
Othman dkk. (2011)	Malaysia	Persentase kepemilikan saham pemerintah

Cahaya dkk. (2012)	Indonesia	1 = Ada kepemilikan saham oleh pemerintah 0 = Tidak ada kepemilikan saham oleh pemerintah
Ashfaq dan Rui (2018)	Pakistan	Persentase kepemilikan saham pemerintah

Walaupun mayoritas penelitian di atas mengukur presentase saham, penulis mengadopsi pendikotomian seperti penelitian Cahaya dkk. (2012). Penulis mengantisipasi jika tidak ada kepemilikan saham oleh pemerintah dalam perusahaan.

3.3.2.4 Operasi Internasional

Tabel 3.5: Metode Pengukuran Operasi Internasional dalam Penelitian Terdahulu

Penulis	Negara	Pengukuran
Cahaya dkk. (2017)	Indonesia	1 = Ada penjualan asing, anak perusahaan asing atau kantor cabang asing 0 = Tidak ada penjualan asing, anak perusahaan asing atau kantor cabang asing
Sari dkk. (2020)	Indonesia, Thailand, Filipina dan Vietnam	1 = Ada penjualan asing, anak perusahaan asing

		atau kantor cabang asing 0 = Tidak ada penjualan asing, anak perusahaan asing atau kantor cabang asing
--	--	---

Metode pendikotomian untuk mengukur variabel operasi internasional dipakai seluruh penelitian di atas. Maka, penulis mengadopsi metode pengukuran tersebut.

3.3.3 Variabel Kontrol

a. Ukuran Perusahaan

Tabel 3.6: Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan dalam Penelitian Terdahulu

Studi	Negara	Pengukuran	Tipe Data
Othman dkk. (2011)	Malaysia	Total Aset	<i>Continuous</i>
Cahaya dkk. (2017)	Indonesia	Total Aset	<i>Continuous</i>
Sari dkk. (2020)	Indonesia, Thailand, Filipina dan Vietnam	Total Aset	<i>Continuous</i>

Semua penelitian di atas mengukur total aset sebagai basis ukuran perusahaan. Maka, penulis mengadopsi metode pengukuran tersebut dalam penelitian ini.

b. Kinerja Ekonomi

Tabel 3.7: Metode Pengukuran Kinerja Ekonomi dalam Penelitian Terdahulu

Studi	Negara	Pengukuran	Tipe Data
Cahaya dkk. (2012)	Indonesia	<i>Return on assets</i> (ROA) = $\frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}}$	<i>Continuous</i>
Cahaya dkk. (2017)	Indonesia	<i>Return on assets</i> (ROA) = $\frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}}$	<i>Continuous</i>

Pengukuran ROA sebagai basis kinerja ekonomi diterapkan semua penelitian di atas. Penulis mengadopsi metode pengukuran tersebut dengan rumusan:

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata-rata total aset dua tahun terakhir}}$$

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

3.4.1 Statistik Deskriptif

Faset statistik deskriptif berupa minimum, maksimum, rerata (*mean*) dan standar deviasi dipakai untuk pendeskripsian variabel penelitian. Pemilihan statistik deskriptif supaya data tertata rapi dan bisa dianalisis sehingga informasi bisa ditemukan (Lind, Marchal dan Wathen, 2012).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Teknik ini ingin mengetahui kesanggupan persamaan regresi dapat digunakan. Selain itu, untuk melihat kesesuaian model persamaan regresi pada data yang banyak. Uji asumsi klasik, sederhananya, pintu awal menuju pengujian hipotesis penelitian—yang di dalamnya terdiri atas tiga tahapan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ingin melihat nilai residu (kesalahan) terdistribusi normal atau sebaliknya. Hasil normal menandakan persamaan regresi tersebut baik. Uji normalitas dapat ditempuh dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, Skewness, dan Kurtosis atau uji Kolmogrov-Smirnov. Pengujian nilai residual menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikan lebih dari 0,05 ($> 0,05$), data residual terdistribusi normal. Hasil sebaliknya jika nilai signifikan kurang dari 0,05 ($< 0,05$) (Ghozali, 2006).

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ingin melihat adakah “korelasi antar variabel independen” (Hadi, 2004). Jika antar variabel independen tidak saling berkorelasi, sebuah persamaan regresi bisa dikatakan baik (Hadi, 2004). Ghozali (2006) menyebut penghitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* tiap variabel independen sering dilakukan dalam uji ini. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan $VIF < 10$, maka tidak ada korelasi antar

variabel independen (multikolinearitas). Hasil sebaliknya jika nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan VIF > 10.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ingin melihat adakah ketidaksamaan nilai residu dari tiap nilai estimasi atau pengamatan (heteroskedastisitas) (Hadi, 2004). Pengamatan itu berupa persebaran titik data populasi. Persamaan regresi yang baik ditunjukkan melalui nilai residu yang sama dari tiap pengamatan (homokedastisitas). Alat uji ini berupa uji Glejser. Nilai signifikansi lebih dari 0,05 (> 0,05) menjadi acuan tidak adanya heteroskedastisitas.

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini hendak menguji hubungan variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dan variabel kontrol dengan variabel dependen (Y). Berdasarkan pemaparan variabel independen dan dependen sebelumnya, persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Keterangan:

Y_1 : tingkat pengungkapan informasi air

a: konstanta

b: koefisien regresi

X_1 : keberadaan komite CSR

X₂: independensi dewan

X₃: kepemilikan pemerintah

X₄: operasi internasional

X₅: ukuran perusahaan

X₆: kinerja ekonomi

e: standard error



BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Verifikasi Data

Sampel penelitian berupa sepuluh perusahaan *high profile* di tiap negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina. Sampel diverifikasi agar tingkat *error* atau tingkat kesalahan pemasukan data kurang dari 10 persen.

4.2 Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif

Pengujian data diawali tahap statistik deskriptif dengan menguji variabel independen (keberadaan komite CSR, kepemilikan pemerintah, independensi dewan dan operasi internasional), variabel dependen (tingkat pengungkapan informasi air), dan variabel kontrol (ukuran perusahaan dan kinerja ekonomi).

4.2.1.1 Statistik Deskriptif pada Variabel Independen

Tersedia data berjenis kontinu (*continuous*) dan kategorik (*categorical*). Hanya variabel independensi dewan dengan suguhan data berjenis *continuous*.

Data *categorical* pada ketiga variabel tersisa, memakai sistem penilaian skala dikotomik: skor 1 menunjukkan variabel mengidentifikasi kriteria dan skor 0 menunjukkan variabel tidak mengidentifikasi kriteria.

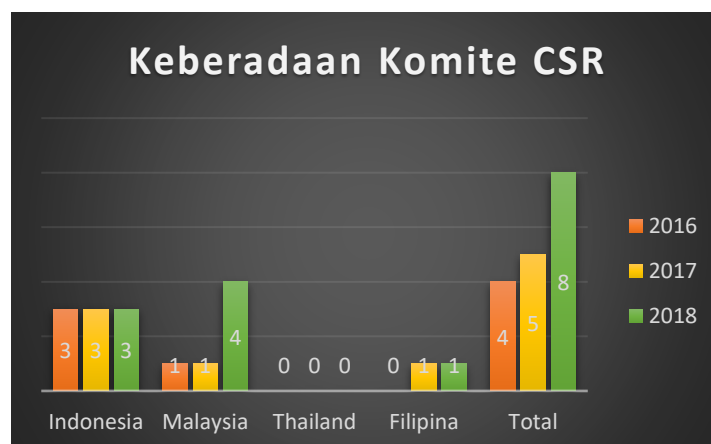
Pertama, variabel independen tersebut keberadaan komite CSR. Skor 1 berarti perusahaan yang memiliki komite CSR dalam struktur organisasi, skor 0 sebaliknya.

Tabel 4.1: Statistik Deskriptif Keberadaan Komite CSR

Keberadaan Komite CSR					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada komite CSR dalam perusahaan	103	85,8	85,8	85,8
	Ada komite CSR dalam perusahaan	17	14,2	14,2	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Perhitungan di atas menerangkan bahwa 17 sampel laporan atau 14.2% tercatat ada komite CSR dalam tubuh perusahaan. Sementara 103 sampel laporan atau 85.8% tidak tercatat keberadaan komite CSR. Simak grafik 4.1 untuk mengetahui frekuensi keberadaan komite CSR tiap negara selama tiga periode fiskal.



Gambar 4.1: Frekuensi Keberadaan Komite CSR Tiap Negara

Periode 2016, keberadaan komite CSR tercatat dalam empat perusahaan. Dua periode berikutnya jumlah keberadaannya naik. Kenaikan dipicu satu perusahaan Filipina pada periode 2017 dan tiga perusahaan Malaysia pada periode 2018. Sementara, jumlah keberadaan komite CSR di perusahaan Indonesia dan Thailand stagnan. Walaupun, rerata keberadaannya di Indonesia cukup tinggi daripada Malaysia, Thailand dan Filipina.

Kedua, variabel independensi dewan diukur menggunakan pembagian antara jumlah komisaris independen dan jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan Indonesia. Sementara, pada perusahaan Malaysia, Thailand dan Filipina menggunakan pembagian antara jumlah direktur independen dan jumlah anggota dewan direktur/direksi.

Tabel 4.2: Statistik Deskriptif Independensi Dewan

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Independensi Dewan	120	15%	67%	38.34%	11.074%

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Tabel 4.2 menunjukkan, secara umum, titik minimal tingkat independensi dewan sebesar 15% dan titik maksimal sebesar 67%. Untuk mengetahui tingkat independensi dewan tiap-tiap negara, bisa simak tabel berikut.

Tabel 4.3: Independensi Dewan Tiap Negara

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Indonesia	30	33%	67%	40.56%	10.249%
Malaysia	30	20%	57%	43.31%	9.271%
Thailand	30	30%	67%	41.39%	10.850%
Filipina	30	15%	44%	28.12%	6.792%

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Tingkat independensi dewan perusahaan *high profile* asal Thailand hampir ekuivalen dengan Indonesia. Namun, secara kuantitatif, hasil lebih unggul dicatat oleh perusahaan *high profile* asal Indonesia. Titik minimalnya, sebesar 33%, paling besar daripada ketiga negara lain. Tingkat independensi dewan terendah, baik dari titik minimal maupun titik maksimalnya, diraih oleh perusahaan *high profile* asal Filipina.

Ketiga, variabel kepemilikan pemerintah. Skor 1 berarti ada kepemilikan saham oleh pemerintah, skor 0 sebaliknya.

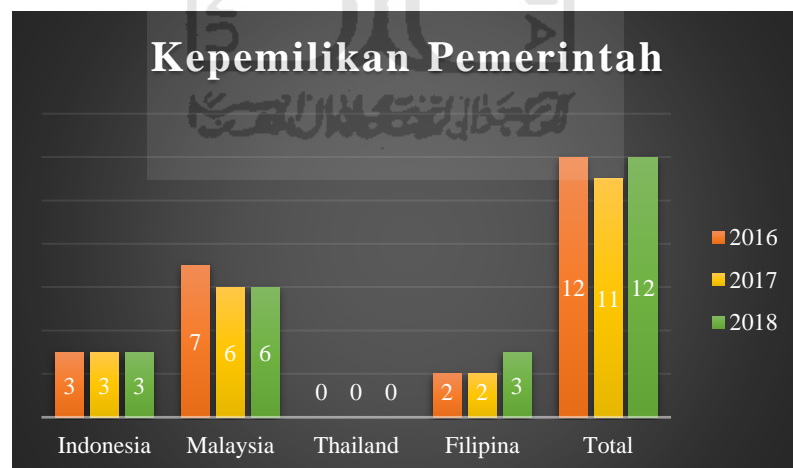
Tabel 4.4: Statistik Deskriptif Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan Pemerintah					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada kepemilikan saham oleh pemerintah	85	70,8	70,8	70,8
	Ada kepemilikan saham oleh pemerintah	35	29,2	29,2	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Keterangan dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa 35 sampel laporan atau 29.2% tercatat adanya kepemilikan saham oleh pemerintah. Sisanya menyatakan tidak ada kepemilikan saham oleh pemerintah. Simak penjabaran secara spesifik pada grafik 4.2.

Secara keseluruhan, tingkat kepemilikan saham oleh pemerintah fluktuatif. Jumlah kepemilikan menurun pada periode 2017 dan naik kembali pada periode berikutnya. Penurunan dipicu institusi pemerintah Malaysia yang tidak lagi memiliki saham dalam salah satu perusahaan Malaysia. Namun, tingkat kepemilikan saham oleh pemerintah di Malaysia nisbi tinggi dibandingkan negara lain. Kenaikan diperoleh akibat institusi pemerintah Filipina memiliki saham dalam salah satu perusahaan Filipina. Sementara, tingkat kepemilikan saham di Indonesia dan Thailand stagnan.



Gambar 4.2: Frekuensi Kepemilikan Pemerintah Tiap Negara

Keempat, variabel operasi internasional. Skor 1 berarti ada penjualan asing, anak perusahaan asing atau kantor cabang asing, skor 0 sebaliknya.

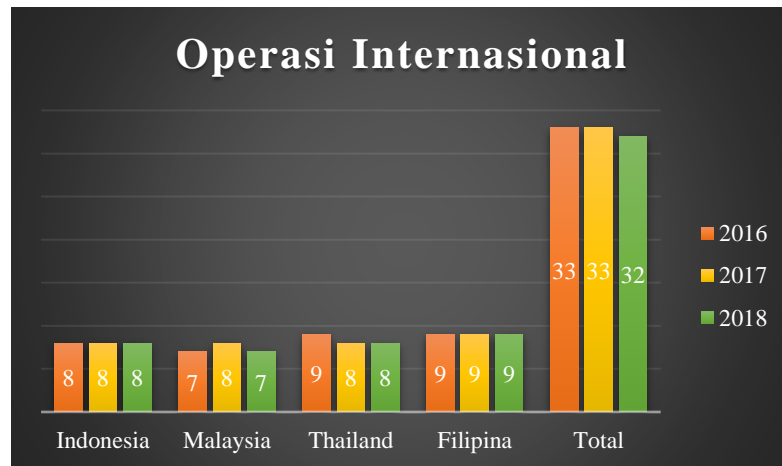
Tabel 4.5: Statistik Deskriptif Operasi Internasional

Operasi Internasional					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada penjualan asng, anak perusahaan asing atau kantor cabang asing	22	18,3	18,3	18,3
	Ada penjualan asng, anak perusahaan asing atau kantor cabang asing	98	81,7	81,7	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Penghitungan di atas menerangkan bahwa 98 sampel laporan atau 81.7% termuat informasi penjualan asing, anak perusahaan asing atau kantor cabang asing. Sisanya tidak memuat informasi tersebut. Berikut penjabaran secara spesifik berdasarkan grafik 4.3.

Baik secara keseluruhan atau per negara, tingkat operasi internasional nisbi stabil. Walaupun, terjadi fluktuasi di Malaysia selama tiga periode dan penurunan jumlah perusahaan Thailand yang beroperasi internasional pada periode 2017. Sementara, stagnansi terjadi di Indonesia dan Filipina selama tiga periode.



Gambar 4.3: Frekuensi Operasi Internasional dalam Tiap Negara

4.2.1.2 Statistik Deskriptif pada Variabel Kontrol

Variabel kontrol tersebut adalah ukuran perusahaan dan kinerja ekonomi. Kebutuhan data untuk kedua variabel ini berjenis *continuous*. Ukuran perusahaan diambil dari total aset perusahaan selama tiga periode fiskal. Kinerja ekonomi diukur melalui pembagian antara laba setelah pajak dan rerata total aset dua tahun terakhir.

Tabel 4.6: Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan

(dalam ribuan USD)					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	120	14,565	4,458,235	653,781.39	839,971.102

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Tabel 4.5 menginformasikan perusahaan dengan nilai total aset terkecil sebesar 14,565 ribu USD dan total aset terbesar sejumlah 4,458,235 ribu USD. Rerata ukuran perusahaan tercatat 653,781.39 ribu USD. Berikut penjabaran ukuran perusahaan tiap-tiap negara pada tabel 4.6

Tabel 4.7: Ukuran Perusahaan Tiap Negara

(dalam ribuan USD)					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Indonesia	30	23,288	2,288,627	869,524.23	727,940.573
Malaysia	30	53,677	4,458,235	859,478.33	1,176,250.204
Thailand	30	22,594	590,387	135,831.37	171,976.274
Filipina	30	14,565	2,340,386	750,291.63	757,018.767

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Bisa diketahui bahwa nilai total aset perusahaan terkecil berasal dari Filipina dan yang terbesar berasal dari Malaysia.

Tabel 4.8: Statistik Deskriptif Kinerja Ekonomi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Ekonomi	120	-15.62%	22.33%	3.8105%	7.53030%

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Tabel 4.7 menerangkan kinerja ekonomi perusahaan terendah dan tertinggi sebesar -15.62% dan 22.33%. Rerata kinerja ekonomi perusahaan 3.8105%. Simak tabel 4.8 yang menyajikan kinerja ekonomi perusahaan tiap negara.

Tabel 4.9: Kinerja Ekonomi Tiap Negara

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Indonesia	30	-5.06	22.33	4.4924	6.18772
Malaysia	30	-10.98	22.17	3.1602	7.09310
Thailand	30	-12.91	16.45	2.5600	8.07474
Filipina	30	-15.62	21.35	5.0295	8.64944

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Kinerja ekonomi perusahaan terendah dicatat oleh salah satu perusahaan asal Filipina. Kinerja ekonomi tertinggi dicatat oleh salah satu perusahaan asal Indonesia.

4.2.1.3 Statistik Deskriptif pada Variabel Dependen

Kebutuhan data pada variabel dependen yaitu mengidentifikasi jumlah kata yang berhubungan dengan pengungkapan informasi air oleh perusahaan. Seperti yang terhimpun dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.10: Statistik Deskriptif Jumlah Kata Pengungkapan Informasi Air

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Kata Pengungkapan Air	120	0	785	43.39	108.326
Jumlah Kata Pengungkapan Air periode 2016	40	0	785	47.85	130.747
Jumlah Kata Pengungkapan Air periode 2017	40	0	641	44.07	109.004
Jumlah Kata Pengungkapan Air periode 2018	40	0	484	38.25	82.345

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Pemakaian metode analisis konten pada variabel dependen menghasilkan jumlah kata yang mengandung informasi air sesuai tiga item dari GRI 303. Berdasarkan tabel 4.9 jumlah kata yang terendah yang diungkap sebesar 0. Artinya, tidak semua perusahaan pada periode 2016-2018 mengungkap informasi air dalam laporan tahunan maupun keberlanjutan.

Jumlah keterungkapan tertinggi sebesar 785 kata dan rata-rata pengungkapannya tersusun dari 43 kata. Simak tabel 4.10 yang menyajikan jumlah kata yang terekam pada negara masing-masing.

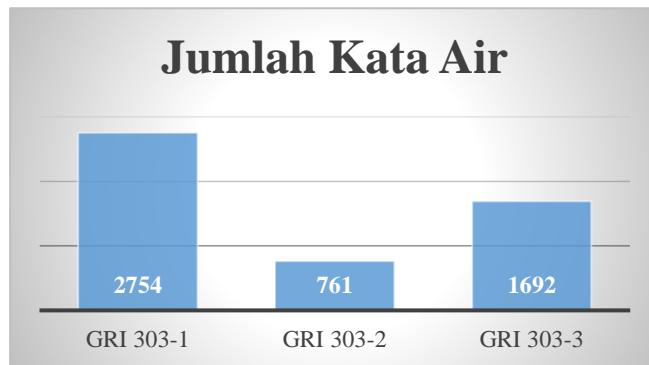
Tabel 4.11: Jumlah Kata yang Berhubungan dengan Air

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Indonesia	30	0	785	92.63	195.725
Malaysia	30	0	143	30.53	44.377
Thailand	30	0	142	25.30	45.810
Filipina	30	0	240	25.10	49.110

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Kejelasan yang bisa diterima adalah, dari titik minimal yang sama bernilai 0, semua perusahaan dari keempat negara tidak mengungkapkan informasi air. Sementara, jumlah kata terbanyak dicatat oleh perusahaan asal Indonesia, dengan 785 kata, yaitu ANTAM. Rata-rata pengungkapan itu di Indonesia tersusun atas 92 kata.

Pengungkapan informasi air dominan pada informasi pengambilan air berdasarkan sumber (GRI 303-1) dengan 2,754 kata. Topik daur ulang dan penggunaan air kembali (GRI 303-3) berada di posisi kedua dengan 1,692 kata. Posisi terakhir ditempati topik sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air (GRI 303-2) dengan 761 kata. Grafik 4.4 ini mengindikasikan ketimpangan pengungkapan informasi air masih besar. Khususnya informasi dengan cakupan GRI 303-2, frekuensi pengungkapan nisbi belum tercatat dalam laporan tahunan atau keberlanjutan.



Gambar 4.4: Jumlah Kata Air menurut Kualifikasi GRI-303

Tabel 4.12: Jumlah Kata Pengungkapan Air Tiap Negara per Indikator

	GRI 303-1	GRI 303-2	GRI 303-3
Indonesia	1,306	239	1,234
Malaysia	602	143	171
Thailand	443	118	198
Filipina	403	261	89

4.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik harus dilalui terlebih dulu. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui nilai residu (kesalahan) terdistribusi normal atau sebaliknya. Standar penentuan distribusi normal mengacu pada nilai

signifikansi Monte Carlo. Normalitas terpenuhi jika nilai signifikan lebih dari 5% atau 0.05. Berikut hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 4.13: Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		120	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	90.09914576	
Most Extreme Differences	Absolute	.238	
	Positive	.238	
	Negative	-.153	
Test Statistic		.238	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.000 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.000
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Bisa terlihat nilai signifikan Monte Carlo kurang dari 0.05, maka data variabel residual tidak terdistribusi normal. Transformasi variabel bisa dilakukan agar data variabel residual terdistribusi normal. Ketentuan normalitas berdasarkan nilai signifikansi Monte Carlo ini merujuk pada Ghozali (2018).

4.3.2 Transformasi Variabel untuk Uji Asumsi Klasik

Transformasi variabel dilakukan pada data *continuous* untuk menghasilkan data seri baru agar memenuhi syarat data terdistribusi normal.

4.3.3 Hasil Uji Normalitas setelah Transformasi Variabel

Uji normalitas kembali dilakukan pasca data variabel *continuous* ditransformasikan. Hasilnya nilai signifikan Monte Carlo lebih besar dari 0.05, yaitu 0.158 atau 15.8%.

Tabel 4.14: Uji Normalitas Pascatransformasi Variabel

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.73784771	
Most Extreme Differences	Absolute	.102	
	Positive	.102	
	Negative	-.063	
Test Statistic			.102
Asymp. Sig. (2-tailed)			.004 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.158 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.148
		Upper Bound	.167
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.			

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

4.3.4 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.15: Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.349	28.231		.367	.715		
Komite CSR	.509	.220	.190	2.313	.023	.812	1.231
LN_IDPN_D WN	-3.994	10.177	-.029	-.392	.695	.977	1.024
Kepemilikan Pemerintah	-.135	.196	-.066	-.689	.492	.602	1.660
Operasi Internasional	.348	.187	.144	1.861	.065	.911	1.097
LN_SIZE	.324	.062	.527	5.220	.000	.537	1.861
LN_ROA	-.061	.087	-.056	-.703	.483	.868	1.152

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0.10 dan VIF kurang dari 10. Maka, tidak ada masalah multikolinearitas pada variabel-variabel penelitian ini.

4.3.5 Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.16: Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-30.311	15.100		-2.007	.047
Komite CSR	.233	.118	.180	1.978	.050
LN_IDPN_DWN	10.541	5.444	.160	1.936	.055
Kepemilikan Pemerintah	-.213	.105	-.214	-2.029	.045

Operasi Internasional	.124	.100	.106	1.239	.218
LN_SIZE	.131	.033	.441	3.948	.000
LN_ROA	-.018	.047	-.035	-.396	.693
a. Dependent Variable: ABS_RES					

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Penggunaan data seri baru, hasil transformasi data variabel berjenis *continuous*, ternyata tidak menghindarkan masalah heterokedastisitas. Menurut Tabachnick dan Fidell (2001), heterokedastisitas memang mungkin bisa melemahkan hasil uji regresi berganda, tetapi tidak membuat hasil uji tersebut tidak valid. Tambahnya, hasil regresi berganda masih bisa dianalisis bila heterokedastisitas masih ada, asal uji asumsi normalitas terpenuhi. Normalitas adalah asumsi utama yang harus terpenuhi dalam regresi berganda (Tabachnick dan Fidell, 2001). Konsisten dengan pendapat Tabachnick dan Fidell (2001) dan beberapa penelitian terdahulu (lihat Cahaya dkk, 2012 dan Cahaya dan Hervina, 2019), meskipun terdapat heterokedastisitas, penelitian ini tetap menggunakan hasil olah data setelah transformasi karena asumsi normalitas telah terpenuhi.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.17: Hasil Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficients	p-value
(constant)	10.349	0.715
Keberadaan Komite CSR	0.509	0.023
Independensi Dewan	-3.994	0.695
Kepemilikan Pemerintah	-0.135	0.492

Operasi Internasional	0.348	0.065
Ukuran Perusahaan (kontrol)	0.324	0.000
Kinerja Ekonomi (kontrol)	-0.061	0.483
Model Summary		
Adjusted R ² Square		0.348
Standard error of the estimate		0.75718
Regression Model		,000
Note :		
Nilai signifikan pada level 10%		

Sumber data: *IBM Statistical SPSS 25 Output, 2020*

Dari tabel 4.14 kita lihat tingkat signifikansi model regresi bernilai 0.000. Artinya model regresi penelitian ini signifikan di bawah tingkat signifikansi satu persen. Lalu, adjusted R² bernilai 0.348, mengartikan ragam praktik pengungkapan informasi air bisa disampaikan oleh variabel prediktor (variabel independen penelitian ini) dalam model sebanyak 34.8 persen.

Ihwal keterpengaruhannya terhadap praktik pengungkapan informasi air, tabel 4.14 mengemukakan hasil variabel keberadaan komite CSR, operasi internasional dan ukuran perusahaan adalah determinator yang signifikan. Kita cermati nilai-p ketiga variabel itu 0.023, 0.065, dan 0.000. Ketiga variabel signifikan pada level 10%. Koefisien ketiga variabel ini positif (0.509, 0.348, 0.324) menunjukkan bahwa keberadaan komite CSR, operasi internasional dan ukuran perusahaan berhubungan positif terhadap tingkat pengungkapan informasi air. Perusahaan *high profile* Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina yang memiliki komite CSR, beroperasi secara internasional dan berukuran lebih besar mengungkapkan informasi yang lebih banyak terkait

tanggung jawab perusahaan terhadap air. Maka, hipotesis satu dan empat dalam penelitian ini terdukung.

Variabel independensi dewan, kepemilikan pemerintah dan kinerja ekonomi tidak mampu menjelaskan praktik pengungkapan informasi air karena nilai signifikansinya lebih dari 10%.

4.5 Interpretasi Hasil Analisis Regresi Berganda Tiap Variabel

Berikut rangkuman hasil pengujian hipotesis penelitian.

Tabel 4.18: Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Hipotesis	Deskripsi	Hasil
Keberadaan Komite CSR	H1	Keberadaan komite CSR mampu menekan jajaran internal perusahaan untuk mengungkapkan informasi air	Hipotesis diterima
Independensi Dewan	H2	Direktur atau komisaris independen mampu menekan perusahaan mengungkapkan informasi air	Hipotesis ditolak
Kepemilikan Pemerintah	H3	Kepemilikan saham oleh pemerintah mampu menekan	Hipotesis ditolak

		perusahaan mengungkapkan informasi air	
Operasi Internasional	H4	Operasional perusahaan yang merentang hingga luar negara memberi tekanan kepada perusahaan itu sendiri untuk mengungkapkan informasi air	Hipotesis diterima

Secara singkat, tabel 4.15 menyajikan hasil pengujian hipotesis penelitian. Kita ketahui bahwa keberadaan komite CSR dan operasi internasional mampu memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air pada perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina. Sebaliknya, hipotesis independensi dewan dan kepemilikan pemerintah tidak diterima atau dianggap tidak mampu memengaruhi keterungkapan informasi air.

Berikut ini temuan penelitian secara eksplanatif.

4.5.1 Keberadaan Komite CSR

Peran komite CSR cukup mampu memaksa jajaran manajemen perusahaan *high profile* mengungkap informasi sumber pengambilan air, pengaruh pengambilan air bagi sumber tersebut dan penggunaan air daur ulang

dalam laporan CSR. Tersisip kata “cukup” karena frekuensi keberadaan komite CSR dalam perusahaan tiap negara (lihat gambar 4.1) tidak cukup tinggi. Tanpa ada komite CSR pun, beberapa perusahaan ternyata bisa (tetap) mengungkap informasi air. Bahkan tidak ada satu perusahaan Thailand pun yang memiliki komite CSR.

Namun, sebab kesignifikanan temuan tetap perlu ditelusuri. Sebab yang paling mungkin adalah paksaan dari komite CSR berupa pengkajian kebijakan atau pengontrolan dan pengawasan komitmen perusahaan terhadap isu air dengan mencantumkan informasi air sesuai panduan GRI 303 dalam laporan CSR.

Temuan serupa bisa dijumpai dalam penelitian Michelin dan Parbonetti (2012), Helfaya dan Moussa (2017), Fuente dkk., (2017) dan Gallego-Alvarez dan Pucheta-Martinez (2019) yang mencatat bahwa keberadaan komite CSR memengaruhi tingkat pengungkapan laporan CSR.

4.5.2 Independensi Dewan

Direksi atau komisaris independen dianggap mampu memaksa perusahaan mengungkap informasi air dalam laporan CSR. Asumsi lahir karena kedua jabatan itu berasal dari lingkungan luar perusahaan dan potensi berelasi atau ada konflik kepentingan antara kedua belah pihak nisbi kecil. Pengabdianya juga tertuju pada kepentingan pemegang saham dan *stakeholder*, bukan kepuasan perusahaan semata. Semakin besar proporsi

anggota independen, daya paksa terhadap perusahaan untuk mengungkap informasi air juga semakin besar.

Wacana di atas berbeda dengan temuan penulis: independensi dewan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi air. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi anggota independen, baik besar maupun kecil, tidak menjamin keindependennya bisa memberi suatu daya paksa. Ketiadaan daya paksa seperti supervisi ketat atau pengarahan dan pengerahan kebijakan operasional perusahaan yang peduli isu air, sehingga kedua jabatan itu tidak memiliki andil pada keterungkapan informasi air dalam laporan CSR. Temuan serupa tercatat dalam penelitian Nurhayati dkk (2006) dan Cahaya dkk (2012) yang masing-masing mengujikan independensi dewan dengan tingkat pengungkapan informasi lingkungan alam dan tenaga kerja.

4.5.3 Kepemilikan Pemerintah

Pemerintah mempunyai daya paksa melalui peraturan tentang pengungkapan CSR oleh perusahaan dan sumber daya air. Peraturan yang bisa disinergikan atau berdiri sendiri. Sanksi diterima perusahaan jika peraturan diabaikan. Terutama perusahaan milik negara berpeluang patuh dan tunduk karena jajaran manajemennya adalah orang-orang pilihan pemerintah. Sehingga, asumsi kepemilikan saham oleh pemerintah atas perusahaan *high profile* akan memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air tidak lahir dari ruang kosong.

Asumsi tak sama dengan temuan penelitian: kepemilikan saham oleh pemerintah tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi air. Ketidaksignifikanan pengaruh mungkin komitmen pemerintah atas isu air lemah sehingga penyidikan dan penyidikan tidak gencar diselenggarakan, alih-alih konstitusi tiap-tiap negara telah mengaturnya. Tekanan “koersif” tetap ada, tetapi, mungkin, perusahaan tak terbebani sehingga informasi air tak terungkap. Temuan serupa terjumpai dalam Chu dkk (2012) dan Faisal dkk (2018) yang masing-masing mengujikan kepemilikan pemerintah terhadap tingkat pelaporan informasi gas rumah kaca pada perusahaan-perusahaan Cina dan emisi gas rumah kaca pada perusahaan-perusahaan Indonesia.

Absennya pemerintah dalam kepemilikan saham, seperti pada kesepuluh perusahaan asal Thailand, memungkinkan ketiadaan tekanan koersif yang diterima perusahaan.

Khusus perusahaan milik negara, ketidaksignifikanan hasil uji nampaknya akibat status perusahaan itu sendiri. Status tersebut berimplikasi pada kebijakan perusahaan yang tidak berintensi pada tata kelola air (Cao dkk, 2007; Chu dkk, 2012), ruang gerak terbatas karena kontrol pemerintah atau untuk penghematan biaya (Zhou, 2009; Chu dkk, 2012) dan legitimasi yang tak perlu dikukuhkan karena perlindungan pemerintah (Tang dan Li, 2009; Chu dkk, 2012).

4.5.4 Operasi Internasional

Perusahaan *high profile* asal negara berkembang, termasuk dari kawasan Asia Tenggara, mendapat sorotan internasional atas kegiatan destruktif sumber daya alam yang masif. Operasional perusahaan melampaui batas mendapat kritikan dan tentangan. Kritikan dan tentangan wajar karena sapuan dampak operasional perusahaan terasakan secara global (peningkatan suhu 1° C di Bumi, pencemaran atau kelangkaan air, penurunan muka tanah, dll), tidak hanya berskala lokal. Lebih-lebih operasional merentang hingga luar negeri, seperti ekspor, pendirian anak perusahaan atau kantor cabang. Negara lain yang dijadikan destinasi operasional perusahaan diasumsikan menuntut transparansi informasi lingkungan (atau air) dari perusahaan melalui tekanan koersif. Tekanan bisa berupa peraturan legal-formal negara setempat, konvensi adat, atau konvensi-konvensi lingkungan, seperti perjanjian iklim Paris, Sustainable Development Goals susunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dll.

Penulis menemukan operasi internasional berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi air. Makna temuan adalah dunia internasional atau negara lain mampu memaksa perusahaan *high profile* mengungkap informasi air dalam laporan CSR. Selain itu, mengindikasikan pula: i) negara-negara lain menganggap penting pengungkapan informasi air agar aktivitas perusahaan bisa diawasi dan diatur sesuai “aturan main” yang disepakati dan ii) syarat pendirian atau keberlanjutan perusahaan.

Temuan ini selaras dalam penelitian Cahaya dkk (2017) yang berpengaruh terhadap pengungkapan informasi kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia.

4.5.5 Variabel Kontrol

Standar ukuran perusahaan dilihat berdasarkan total aset perusahaan. Aset, sederhananya, adalah sumber ekonomi perusahaan. Sebagai bentuk tanggung jawab atau konsekuensi ekonomi atas pengambilan dan pengaruh pengambilan air untuk operasional perusahaan yang terkapitalisasi, ada perusahaan *high profile* yang mengungkapkan informasi air. Namun, ada juga perusahaan yang mengungkap informasi air atas dasar tanggung jawab atau konsekuensi sosial, moral, lingkungan atau lainnya yang tidak berada dalam kluster ekonomi (ukuran perusahaan. Indikasi ini karena nilai-p ukuran perusahaan tergolong rendah. Maka, bisa disimpulkan tidak semua perusahaan *high profile* mengungkap informasi air atas pengaruh ukuran perusahaan.

Kinerja ekonomi berpotensi memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air. Ketika kondisi keuangan prima atau wajar, aksentuasi program atau kebijakan peduli air bisa berlaku dan akan terungkap dalam laporan CSR. Walaupun saat kondisi sebaliknya, tidak menutup peluang bagi keterungkapan informasi air.

Penulis menemukan kinerja ekonomi tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi air. Temuan mengindikasikan perusahaan tidak ingin mengeluarkan biaya untuk tanggung jawab air dan

memilih bungkam atas isu yang genting ini, meskipun kinerja ekonominya prima atau wajar. Setali tiga uang, kemerosotan kinerja ekonomi menyebabkan pengetatan atau pemangkasan beberapa biaya, salah satunya biaya tanggung jawab air, sehingga program atau kebijakan bertema air urung terjadi. Ketiadaan program atau kebijakan itu artinya tidak ada informasi apapun yang membahas air dalam laporan CSR.



BAB V

SIMPULAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini berusaha melacak tingkat pengungkapan informasi air dalam perusahaan-perusahaan *high profile* di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina. Sepuluh perusahaan yang tercatat dalam bursa efek negara masing-masing terpilih secara acak dalam populasi perusahaan *high profile* di tiap negara amatan untuk diteliti laporan tahunan dan keberlanjutannya (opsional). Laporan itu berperiode 2016, 2017 dan 2018.

Tekanan koersif, elemen dari *isomorphism*—faset teori institusional, menjadi kerangka berpikir agar faktor keterungkapan informasi air teridentifikasi. Penulis mengujinya dengan empat variabel independen (keberadaan komite CSR, independensi dewan, kepemilikan pemerintah dan operasi internasional) dan dua variabel kontrol (ukuran perusahaan dan kinerja ekonomi).

Metode analisis konten dipilih untuk melacak jumlah kata air dalam laporan tahunan dan keberlanjutan dengan pedoman GRI 303 tentang air. Hasilnya sebanyak 2.754 kata tersusun sesuai indikator GRI 303-1 (pengambilan air berdasarkan sumber), 761 kata tersusun sesuai indikator GRI 303-2 (sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air) dan 1.692 kata tersusun sesuai indikator GRI 303-3 (daur ulang dan penggunaan air kembali). Hanya ada enam perusahaan yang melaporkan ketiga indikator secara bersamaan, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (Indonesia), PT Astra Agro Lestari Tbk (Indonesia),

Chemical Company of Malaysia Berhad, Petronas Gas Berhad (Malaysia), Birla Carbon (Thailand) dan Semirara Mining and Power Corporation (Filipina).

Berikut rangkuman simpulan penelitian.

Tabel 5.1: Rangkuman Simpulan Penelitian

Pertanyaan Penelitian	Jawaban
Bagaimana tingkat pengungkapan informasi air dalam perusahaan-perusahaan <i>high profile</i> di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina?	Tingkat pengungkapan informasi air perusahaan-perusahaan <i>high profile</i> di keempat negara masih rendah karena hanya 6 dari 40 perusahaan yang mengungkap tiga indikator sekaligus. Rerata pengungkapan informasi air di keempat negara pun hanya tersusun dari 43 kata.
Apakah keberadaan komite CSR memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air dalam perusahaan-perusahaan <i>high profile</i> di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina?	Keberadaan komite CSR berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi air dalam perusahaan <i>high profile</i> di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.
Apakah independensi dewan memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air dalam perusahaan-	Independensi dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi air dalam perusahaan <i>high profile</i> di

perusahaan <i>high profile</i> di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina?	Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.
Apakah kepemilikan pemerintah memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air dalam perusahaan-perusahaan <i>high profile</i> di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina?	Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi air dalam perusahaan <i>high profile</i> di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.
Apakah operasi internasional memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air dalam perusahaan-perusahaan <i>high profile</i> di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina?	Operasi internasional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi air dalam perusahaan <i>high profile</i> di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina.

Tabel di atas menerangkan bahwa beberapa faktor keterungkapan informasi air teridentifikasi melalui pola pemikiran tekanan koersif secara parsial.

5.2 Implikasi Penelitian

Tekanan koersif terbukti mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan informasi air. Dua dari empat variabel independen signifikan sesuai hipotesis penelitian. Satu variabel kontrol juga signifikan dalam arah hubungan yang positif.

Memang, temuan penelitian mengemukakan keberadaan komite CSR memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air. Namun, kesignifikannya berada dalam level yang lemah. Hal ini mengimplikasikan bahwa sikap perusahaan *high profile* atas keberadaan komite CSR masih ambivalen. Pada satu sisi, keberadaannya bisa berfungsi sebagai perumus kebijakan dan pengawas aktivitas perusahaan yang mementingkan kelestarian dan keamanan air. Pada sisi lain, bisa saja perusahaan ingin struktur organisasi yang ramping—umumnya komite *good governance* yang mengawasi aktivitas CSR—sehingga birokrasi tidak rumit.

Harapan pelibatan anggota independen supaya mampu mengawasi secara objektif karena asumsi ketiadaan konflik kepentingan dengan perusahaan. Temuan, seperti dipaparkan dalam bab sebelumnya, mematahkan harapan. Artinya perusahaan menunjuk anggota independen, dalam rapat umum pemegang saham, yang minim pengalaman atau perhatian terhadap masalah atau isu air dalam kerja pengawasan atau pengarahannya.

Ketidaksignifikansian hubungan antara kepemilikan pemerintah dan tingkat pengungkapan informasi air bisa dilihat dari berbagai sisi. Komitmen pemerintah atas isu air yang lemah, alih-alih konstitusi tiap-tiap negara tersedia, sehingga penyidikan dan penyidikan tidak digalakkan. Tekanan “koersif” tetap ada, tetapi perusahaan tidak terbebani untuk mengungkap informasi air, alih-alih tidak ada sanksi yang tegas. Asumsi tersebut berlaku bagi pemerintah yang memiliki saham perusahaan. Absennya kepemilikan saham oleh pemerintah, seperti pada kesepuluh perusahaan asal Thailand, mungkin memengaruhi juga hasil penelitian ini.

Sisi terakhir yang bisa ditilik adalah sisi paradoksal status “perusahaan milik negara”. Imbasnya adalah kebijakan yang menihilkan isu air, ketidakleluasaan jajaran manajemen bergerak akibat kontrol ketat pemerintah, penghematan biaya dan berlindung di balik pemerintah atas tuntutan isu air.

Signifikansi hubungan operasi internasional terhadap pengungkapan informasi air bisa dimaknai dua hal. Pertama, setiap negara lain yang menjadi tempat operasional perusahaan *high profile* asal keempat negara ini, menuntut transparansi informasi air. Informasi bisa saja disandingkan dengan realita di lapangan (*decoupling*) untuk diuji kesahihannya dan keabsahannya. Jika pengujian menunjukkan hasil sebaliknya, sanksi sesuai peraturan negara setempat bisa dikenakan. Kedua, perusahaan yang ingin tetap beroperasi di negara lain, harus mensinkronkan visi dan misinya, aktivitasnya, strateginya, manajerialnya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, kearifan-kearifan negara bersangkutan mengenai air, baik air sebagai sumber penghidupan maupun keseimbangan alam. Salah satu langkah perwujudannya adalah pengungkapan informasi air yang kredibel, tidak bias, lengkap dan presisi.

Ukuran perusahaan teridentifikasi memengaruhi tingkat pengungkapan informasi air, tetapi pada level yang rendah. Implikasi temuan ini adalah perusahaan mengungkap informasi air bisa jadi karena wujud tanggung jawab atau konsekuensi ekonomi (ukuran perusahaan) atau nonekonomi (sosial, moral, lingkungan atau lainnya). Terakhir, kinerja ekonomi teridentifikasi tidak berhubungan signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi air. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi biaya untuk pengadaan program bertema air

belum masuk agenda kerja, walaupun kinerja ekonomi perusahaan tergolong prima. Sedangkan saat kinerja ekonomi merosot atau lesu, perusahaan tentu melakukan pengetatan atau pemangkasan biaya-biaya tertentu, salah satunya mungkin biaya pengadaan program bertema air.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berikut keterbatasan penelitian pengungkapan informasi air ini.

- 1) Penelitian ini hanya menyentuh bagian permukaan masalah. Validitas antara informasi dalam laporan dan kondisi riil tidak terkonfirmasi. Hal itu juga karena hanya data sekunder yang menjadi rujukan.
- 2) Tidak semua negara dalam Asia Tenggara diteliti—yang notabene kawasan dengan aktivitas industrialnya sangat masif.
- 3) Aksesibilitas beberapa laporan perusahaan tidak mudah karena, baik dari bursa efek maupun situs web perusahaan, tidak lengkap atau tidak tersedia. Penelusuran melalui *database* lain pun menjadi opsi alternatif.

5.4 Saran

Berikut rekomendasi untuk peneliti pada masa yang akan datang.

- 1) Pengimplementasian penelitian bermetode kualitatif agar memperdalam temuan pengungkapan informasi air *an sich* dan validitas terhadap kondisi riilnya terkonfirmasi.
- 2) Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk meneliti pengungkapan informasi air semua negara di Asia Tenggara.

DAFTAR REFERENSI

- Amran, A., & Devi, S. S. (2008). The impact of government and foreign affiliate influence on corporate social reporting. *Managerial Auditing Journal*, 386-404.
- Andrini, L. (2016). Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia. *Mimbar Hukum Vol. 28, No. 3*, 512-525.
- Ashfaq, K., & Rui, Z. (2018). Revisiting the relationship between corporate governance and corporate social and environmental disclosure practices in Pakistan. *Social Responsibility Journal*.
- Burritt, R. L., Christ, K. L., & Omori, A. (2016). Drivers of corporate water-related disclosure: evidence from Japan. *Journal of Cleaner Production*, 65-74.
- Cahaya, F. R., & Hervina, R. (2019). Do human rights issues matter? An empirical analysis of Indonesian companies' reporting. *Social Responsibility Journal*, 226-243.
- Cahaya, F. R., Porter, S. A., Tower, G., & Brown, A. (2012). Indonesia's low concern for labour issues. *Social Responsibility Journal*, 114-132.
- Cahaya, F. R., Porter, S., Tower, G., & Brown, A. (2017). Coercive pressures on occupational health and safety disclosures. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 318-336.
- Chu, C. I., Chatterjee, B., & Brown, A. (2012). The current status of greenhouse gas reporting by Chinese companies. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 12 Iss 2, 114-139.
- Deegan, C. (2017). Twenty five years of social and environmental accounting research within Critical Perspectives of Accounting: Hits, misses and ways forward. *Critical Perspectives on Accounting*, 65-87.
- Dermawan, R. (2019, Agustus 24). *Ancaman sampah impor dari Barat dan pentingnya kerja sama ASEAN untuk keamanan lingkungan*. Retrieved from The Conversation Indonesia: <https://theconversation.com/ancaman-sampah-impor-dari-barat-dan-pentingnya-kerja-sama-asean-untuk-keamanan-lingkungan-121436>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Association*, 147-160.
- El-Bassiouny, D., & Letmathe, P. (2018). The adoption of CSR practices in Egypt: internal efficiency or external legitimation? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*.

- Faisal, F., Andiningtyas, E. D., Achmad, T., & Haryanto, H. (2018). The content and determinants of greenhouse gas emission. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 1397-1406.
- Fernandez-Gago, R., Cabeza-Garcia, L., & Nieto, M. (2014). Corporate social responsibility, board of directors, and firm performance: an analysis of their relationships.
- Fuad, M. B. (2019). Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 97-125.
- Fuente, J. A., Garcia-Sanchez, I. M., & Lozano, M. B. (2016). The Role of the Board of Directors in the Adoption of GRI Guidelines for the Disclosure of CSR Information. *Journal of Cleaner Production*, 1-62.
- Gallego-Alvarez, I., & Pucheta-Martinez, M. C. (2019). Corporate social responsibility reporting and corporate governance mechanisms: An international outlook from emerging countries. *Business Strategy and Development*, 1-21.
- Geall, S. (2019, November 20). *Southeast Asia and the right to safe water*. Retrieved from The Third Pole: <https://www.thethirdpole.net/2019/11/20/southeast-asia-and-the-right-to-safe-water/>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gizzi, L. (Director). (2020). *War For Water: What Happens When Asia's Rivers Dry Up?* [Motion Picture].
- Hadi, S. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 391-430.
- Hazelton, J. (2013). Accounting as a human right: the case of water information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 266-311.
- Helfaya, A., & Moussa, T. (2017). Do Board's Corporate Social Responsibility Strategy and Orientation Influence Environmental Sustainability Disclosure? UK Evidence. *Business Strategy and the Environment*.
- Higgins, C., & Larrinaga, C. (2014). Sustainability reporting: insights from institutional theory. In J. Bebbington, J. Unerman, B. O'Dwyer, & (Eds),

Sustainability Accounting dan Accountability (pp. 273-285). New York: Routledge.

- Htay, S. S., Ab. Rashid, H. M., Adnan, M. A., & Meera, A. K. (2012). Impact of Corporate Governance on Social and Environmental Information Disclosure of Malaysian Listed Banks: Panel Data Analysis. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 1-24.
- Issarawornrawanich, P., & Wuttichindanon, S. (2018). Corporate social responsibility practices and disclosures in Thailand. *Social Responsibility Journal*.
- Jiang, G. (2017, November 27). *Vice Indonesia*. Retrieved from Menelusuri Sungai Mekong, Melihat Krisis Lingkungan Akibat Tambang Pasir: <https://vice.com/id/article/j5jw9p/menelusuri-sungai-mekong-melihat-krisis-kemanusiaan-akibat-tambang-pasir>
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Business Ethics*, 207-223.
- Kotler, P., & Lee, N. (2005). *Corporate Social Responsibility; Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Kyaw, L. K. (2019, Oktober 17). *Myanmar Has Just Five Listed Stocks. Now it Wants Another Exchange*. Retrieved from Bloomberg: www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-16/myanmar-has-just-five-stocks-now-it-wants-another-equity-market
- Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2012). *Statistical Techniques in Business & Economics*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Lu, J. Y., & Castka, P. (2009). Corporate Social Responsibility in Malaysia - Experts' Views and Perspectives. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 16, 146-154.
- Mendoza, M. L. (2011). Developing a Corporate Social Responsibility Index in the Philippines: An Assessment. *Transnational Corporations Review*, 3:3, 51-60.
- Michelon, G., & Parbonetti, A. (2012). The effect of corporate governance on sustainability disclosure. *Journal of Management and Governance*, 477-509.
- Najah, M. M. (2012). *Carbon risk management, carbon disclosure and stock market effects: An international perspective*. Disertasi: University of Southern Queensland.

- Nasir, N. E., Halim, N. A., Sallem, N. R., Jasni, N. S., & Aziz, N. F. (2015). Corporate Social Responsibility: An Overview from Malaysia. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences* 4 (10S), 82-87.
- Nitta, Y. (2020, Maret 24). *Myanmar's stock market cracks open door to foreigners*. Retrieved from Nikkei Asian Review: www.asia.nikkei.com/Business/Markets/Myanmar-s-stock-market-cracks-open-door-to-foreigners
- Nurhayati, R., Brown, A., & Tower, G. (2006). Understanding the Level of Natural Environment Disclosures by Indonesian Listed Companies. *Journal of the Asia Pasific Centre of Environmental Accountability*, Vol. 12 No. 3, 4-11.
- Othman, S., Darus, F., & Arshad, R. (2011). The influence of coercive isomorphism on corporate social responsibility reporting and reputation. *Social Responsibility Journal*, 118-135.
- Pink, R. M. (2016). *Water Rights in Southeast Asia and India*. London: Palgrave Macmillan.
- Pucheta-Martinez, M. C., Bel-Oms, I., & Nekhili, M. (2018). The contribution of financial entities to the sustainable development through the reporting of corporate social responsibility information. *Sustainable Development*, 1-13.
- Putra, D. M. (2016). Kontribusi Industri Tekstil dalam Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun Terhadap Rusaknya Sungai Citarum. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 133-152.
- Rajanakorn, N. (2012). Examining Corporate Social Responsibility in Thailand: A View from Thai companies. *Disertasi*. University of Tennessee.
- Rao, K., & Tilt, C. (2016). Board diversity and CSR reporting: an Australian study. *Meditari Accountancy Research*, Vol. 24 Iss 2, 182-210.
- Roberts, R. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory. *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 17, No. 6, 595-612.
- Said, R., Zainuddin, Y. H., & Haron, H. (2009). The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. *Social Responsibility Journal*, 212-226.
- Sari, T. K., Cahaya, F. R., & Joseph, C. (2020). Coercive Pressures and Anti-corruption Reporting: The Case of ASEAN Countries. *Journal of Business Ethics*.
- Soobaroyen, T., & Mahadeo, J. D. (2016). Community disclosures in a developing country : insights from neo-pluralist perspective. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 29 Iss 3, 452-482.

- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). *Using Multivariate Statistics, 4th ed.* Boston: Pearson Education Company.
- Talbot, D., & Barbat, G. (2019). Water disclosure in the mining sector: An assessment of the credibility of sustainability reports. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 1-11.
- The ASEAN Post Team. (2019, Desember 12). *Southeast Asia's rivers under threat*. Retrieved from The ASEAN Post: <https://theaseanpost.com/article/southeast-asias-rivers-under-threat>
- Veloso, A. C., & Vallada, A. M. (2019, Juli 1). *Philippines: SEC Releases Sustainability Reporting Guidelines*. Retrieved from Global Compliance News: <https://globalcompliancenews.com/philippines-sec-releases-sustainability-reporting-guidelines-20190522/>
- Yin, S. C. (2018, Maret 15). *National Geographic*. Retrieved from Dramatic Photos Show How Sand Mining Threatens a Way of Life in Southeast Asia: <https://nationalgeographic.com/news/2018/03/vietnam-mekong-illegal-sand-mining/>
- Yu, H.-C., Kuo, L., & Ma, B. (2020). The Drivers of Corporate Water Disclosure in Enhancing Information Transparency. *Sustainability*, 1-14.
- Zeng, H., Zhang, T., Zhou, Z., Zhao, Y., & Chen, X. (2019). Water disclosure and firm risk: Empirical evidence from highly water-sensitive industries in China. *Business Strategy and the Environment*, 1-22.
- Zhou, Z., Liu, L., Zeng, H., & Chen, X. (2018). Does water disclosure cause a rise in corporate taking? -evidence from Chinese high water-risk industries. *Journal of Cleaner Production*.
- Zhou, Z., Zhou, H., Zeng, H., & Chen, X. (2018). The impact of water information disclosure on the cost of capital: An empirical study of China's capital market. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 1-18.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Perusahaan Sampel

Tabel 1.1: Daftar Perusahaan *High Profile* di Indonesia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk
3	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk
4	PTBA	PT Bukit Asam Tbk
5	INDR	PT Indo-Rama Synthetics Tbk
6	KAEF	PT Kimia Farma Tbk
7	PBRX	PT Pan Brothers Tbk
8	SSTM	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk
9	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
10	APLI	PT Asiaplast Industries Tbk

Tabel 1.2: Daftar Perusahaan *High Profile* di Malaysia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	BSTEAD	Boustead Plantation Bhd.
2	BPPLAS	BP Plastics Holdings Bhd.
3	CCM	Chemical Company of Malaysia Bhd.

4	ENGTEX	Engtex Group Bhd.
5	GASMSIA	Gas Malaysia Bhd.
6	MCEMENT	Lafarge Malaysia Bhd.
7	RSAWIT	Rimbunan Sawit Bhd.
8	SOP	Sarawak Oil Palms Bhd.
9	TOYOINK	Toyo Ink Group Bhd.
10	PETGAS	Petronas Gas Bhd.

Tabel 1.3: Daftar Perusahaan *High Profile* di Thailand

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	BCT	Thai Carbon Black Public Co. Ltd.
2	CBG	Carabao Group Public Co. Ltd.
3	CPI	Chumporn Palm Oil Industry Public Co. Ltd.
4	PG	People's Garment Public Co. Ltd.
5	TPCORP	Textile Prestige Public Co. Ltd.
6	UT	Union Textile Industries Public Co. Ltd.
7	UMS	Unique Mining Services Public Co. Ltd.
8	UPOIC	United Palm Oil Industry Public Co. Ltd.
9	VPO	Vichitbhan Palmoil Public Co. Ltd.
10	YUASA	Yuasa Battery Public Co. Ltd.

Tabel 1.4: Daftar Perusahaan *High Profile* di Filipina

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	APX	Apex Mining Co. Inc.
2	AT	Atlas Consolidated Mining & Development Corp.
3	BSC	Basic Energy Corp.
4	PPC	Pryce Corp.
5	EEI	EEI Corp.
6	SCC	Semirara Mining & Power Corp.
7	MVC	Mabuhay Vinyl Corp.
8	MWC	Manila Water Company Inc.
9	MARC	Marcventures Holdings Corp.
10	SHLPH	Pilipinas Shell Petroleum Corp.

LAMPIRAN 2

Checklist Laporan Tahunan dan Keberlanjutan

Tabel 2.1: Checklist Laporan Tahunan dan Keberlanjutan di Indonesia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan
1	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk	√	
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	√	√
3	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	√	√
4	PTBA	PT Bukit Asam Tbk	√	√
5	INDR	PT Indo-Rama Synthetics Tbk	√	√
6	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	√	
7	PBRX	PT Pan Brothers Tbk	√	
8	SSTM	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk	√	
9	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	√	
10	APLI	PT Asiaplast Industries Tbk	√	

Tabel 2.2: Checklist Laporan Tahunan dan Keberlanjutan di Malaysia

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan
1	BSTEAD	Boustead Plantations Bhd.	√	√
2	BPPLAS	BP Plastics Holdings Bhd.	√	
3	CCM	Chemical Company of Malaysia Bhd.	√	√

4	ENGTEX	Engtex Group Bhd.	√	
5	GASMSIA	Gas Malaysia Bhd.	√	
6	MCEMENT	Lafarge Malaysia Bhd.	√	
7	RSAWIT	Rimbunan Sawit Bhd.	√	
8	SOP	Sarawak Oil Palms Bhd.	√	
9	TOYOINK	Toyo Ink Group Bhd.	√	
10	PETGAS	Petronas Gas Bhd.	√	√

Tabel 2.3: Checklist Laporan Tahunan dan Keberlanjutan di Thailand

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan
1	BCT	Thai Carbon Black Public Co. Ltd.	√	√
2	CBG	Carabao Group Public Co. Ltd.	√	
3	CPI	Chumporn Palm Oil Industry Public Co. Ltd.	√	
4	PG	People's Garment Public Co. Ltd.	√	
5	TPCORP	Textile Prestige Public Co. Ltd.	√	√
6	UT	Union Textile Industries Public Co. Ltd.	√	
7	UMS	Unique Mining Services Public Co. Ltd.	√	

8	UPOIC	United Palm Oil Industry Public Co. Ltd.	√	
9	VPO	Vichitbhan Palmoil Public Co. Ltd.	√	
10	YUASA	Yuasa Battery Public Co. Ltd.	√	

Tabel 2.4: Checklist Laporan Tahunan dan Keberlanjutan di Filipina

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan
1	APX	Apex Mining Co. Inc.	√	
2	AT	Atlas Consolidated Mining & Development Corp.	√	√
3	BSC	Basic Energy Corp.	√	
4	PPC	Pryce Corp.	√	
5	EEI	EEI Corp.	√	
6	SCC	Semirara Mining & Power Corp.	√	
7	MVC	Mabuhay Vinyl Corp.	√	
8	MWC	Manila Water Company Inc.	√	√
9	MARC	Marcventures Holdings Corp.	√	
10	SHLPH	Pilipinas Shell Petroleum Corp.	√	√

LAMPIRAN 3

Data Variabel Independen

Tabel 3.1: Data Variabel Independen di Indonesia

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Variabel Independen			
				Keberadaan Komite CSR	Independensi Dewan	Kepemilikan Pemerintah	Operasi Internasional
1	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk	2016	0	0.33	0	0
			2017	0	0.33	0	0
			2018	0	0.33	0	0
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	2016	1	0.33	1	1
			2017	1	0.33	1	1
			2018	1	0.33	1	1
3	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	2016	0	0.40	0	1
			2017	0	0.40	0	1
			2018	0	0.50	0	1
4	PTBA	PT Bukit Asam Tbk	2016	1	0.33	1	1
			2017	1	0.33	1	1
			2018	1	0.33	1	1
5	INDR	PT Indo-Rama Synthetics Tbk	2016	1	0.40	0	1
			2017	1	0.40	0	1
			2018	1	0.33	0	1

6	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	2016	0	0.40	1	1
			2017	0	0.40	1	1
			2018	0	0.40	1	1
7	PBRX	PT Pan Brothers Tbk	2016	0	0.67	0	1
			2017	0	0.67	0	1
			2018	0	0.67	0	1
8	SSTM	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk	2016	0	0.40	0	1
			2017	0	0.40	0	1
			2018	0	0.40	0	1
9	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	2016	0	0.33	0	1
			2017	0	0.33	0	1
			2018	0	0.33	0	1
10	APLI	PT Asiaplast Industries Tbk	2016	0	0.50	0	0
			2017	0	0.33	0	0
			2018	0	0.50	0	0

Tabel 3.2: Data Variabel Independen di Malaysia

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Variabel Independen			
				Keberadaan Komite CSR	Independensi Dewan	Kepemilikan Pemerintah	Operasi Internasional
1	BSTEAD	Boustead Plantations Bhd.	2016	1	0.50	1	0
			2017	1	0.50	1	1
			2018	1	0.50	1	1
2	BPPLAS	BP Plastics Holdings Bhd.	2016	0	0.50	0	1
			2017	0	0.57	0	1
			2018	0	0.57	0	1
3	CCM	Chemical Company of Malaysia Bhd.	2016	0	0.44	1	1
			2017	0	0.50	0	1
			2018	1	0.44	0	1
4	ENGTEX	Engtex Group Bhd.	2016	0	0.43	0	1
			2017	0	0.43	0	1
			2018	1	0.43	0	0
5	GASMSIA	Gas Malaysia Bhd.	2016	0	0.50	1	0
			2017	0	0.50	1	0
			2018	0	0.56	1	0
6	MCEMENT	Lafarge Malaysia Bhd.	2016	0	0.46	1	1
			2017	0	0.44	1	1
			2018	0	0.43	1	1

7	RSAWIT	Rimbunan Sawit Bhd.	2016	0	0.29	1	0
			2017	0	0.29	1	0
			2018	0	0.33	1	0
8	SOP	Sarawak Oil Palms Bhd.	2016	0	0.20	1	1
			2017	0	0.27	1	1
			2018	0	0.27	1	1
9	TOYOINK	Toyo Ink Group Bhd.	2016	0	0.43	0	1
			2017	0	0.43	0	1
			2018	0	0.43	0	1
10	PETGAS	Petronas Gas Bhd.	2016	0	0.43	1	1
			2017	0	0.43	1	1
			2018	1	0.50	1	1

Tabel 3.3: Data Variabel Independen di Thailand

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Variabel Independen			
				Keberadaan Komite CSR	Independensi Dewan	Kepemilikan Pemerintah	Operasi Internasional
1	BCT	Thai Carbon Black Public Co. Ltd.	2016	0	0.60	0	1
			2017	0	0.60	0	1
			2018	0	0.60	0	1
2	CBG	Carabao Group Public Co. Ltd.	2016	0	0.44	0	1
			2017	0	0.44	0	1

			2018	0	0.44	0	1
3	CPI	Chumporn Palm Oil Industry Public Co. Ltd.	2016	0	0.30	0	1
			2017	0	0.30	0	1
			2018	0	0.36	0	1
4	PG	People's Garment Public Co. Ltd.	2016	0	0.42	0	1
			2017	0	0.42	0	1
			2018	0	0.42	0	1
5	TPCORP	Textile Prestige Public Co. Ltd.	2016	0	0.33	0	1
			2017	0	0.33	0	1
			2018	0	0.33	0	1
6	UT	Union Textile Industries Public Co. Ltd.	2016	0	0.33	0	1
			2017	0	0.33	0	1
			2018	0	0.33	0	1
7	UMS	Unique Mining Services Public Co. Ltd.	2016	0	0.50	0	1
			2017	0	0.67	0	0
			2018	0	0.67	0	0
8	UPOIC	United Palm Oil Industry Public Co. Ltd.	2016	0	0.38	0	0
			2017	0	0.38	0	0
			2018	0	0.38	0	0
9	VPO	Vichitbhan Palmoil Public Co. Ltd.	2016	0	0.33	0	1
			2017	0	0.38	0	1
			2018	0	0.38	0	1
10	YUASA	Yuasa Battery Public Co. Ltd.	2016	0	0.30	0	1
			2017	0	0.36	0	1

			2018	0	0.36	0	1
--	--	--	------	---	------	---	---

Tabel 3.4: Data Variabel Independen di Filipina

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Variabel Independen			
				Keberadaan Komite CSR	Independensi Dewan	Kepemilikan Pemerintah	Operasi Internasional
1	APX	Apex Mining Co. Inc.	2016	0	0.29	0	1
			2017	0	0.29	0	1
			2018	0	0.22	0	1
2	AT	Atlas Consolidated Mining & Development Corp.	2016	0	0.36	1	1
			2017	0	0.36	1	1
			2018	0	0.27	1	1
3	BSC	Basic Energy Corp.	2016	0	0.27	0	1
			2017	0	0.27	0	1
			2018	0	0.27	0	1
4	PPC	Pryce Corp.	2016	0	0.29	0	0
			2017	0	0.29	0	0
			2018	0	0.29	1	0
5	EEI	EEI Corp.	2016	0	0.33	0	1
			2017	0	0.44	0	1
			2018	0	0.33	0	1
	SCC		2016	0	0.20	0	1

6		Semirara Mining & Power Corp.	2017	0	0.18	0	1
			2018	0	0.20	0	1
7	MVC	Mabuhay Vinyl Corp.	2016	0	0.25	0	1
			2017	0	0.29	0	1
			2018	0	0.25	0	1
8	MWC	Manila Water Company Inc.	2016	0	0.36	0	1
			2017	0	0.36	0	1
			2018	0	0.36	0	1
9	MARC	Marcventures Holdings Corp.	2016	0	0.33	0	1
			2017	0	0.18	0	1
			2018	0	0.15	0	1
10	SHLPH	Pilipinas Shell Petroleum Corp.	2016	0	0.18	1	1
			2017	1	0.27	1	1
			2018	1	0.27	1	1

LAMPIRAN 4

Data Pengungkapan Informasi Air

Tabel 4.1: Data Pengungkapan Informasi Air di Indonesia

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Variabel Dependen			Total
			Pengungkapan Informasi Air			
			GRI 303-1	GRI 303-2	GRI 303-3	
1	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk	0	0	87	87
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	780	97	1,033	1,910
3	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	245	80	63	388
4	PTBA	PT Bukit Asam Tbk	174	62	0	236
5	INDR	PT Indo-Rama Synthetics Tbk	0	0	51	51
6	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	0	0	0	0
7	PBRX	PT Pan Brothers Tbk	0	0	0	0
8	SSTM	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk	0	0	0	0
9	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	107	0	0	107

10	APLI	PT Asiaplast Industries Tbk	0	0	0	0
----	------	-----------------------------	---	---	---	---

Tabel 4.2: Data Pengungkapan Informasi Air di Malaysia

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Variabel Dependen			Total
			Pengungkapan Informasi Air			
			GRI 303-1	GRI 303-2	GRI 303-3	
1	BSTEAD	Boustead Plantations Bhd.	0	0	0	0
2	BPPLAS	BP Plastics Holdings Bhd.	0	0	0	0
3	CCM	Chemical Company of Malaysia Bhd.	24	31	32	87
4	ENGTEX	Engtex Group Bhd.	55	0	91	146
5	GASMSIA	Gas Malaysia Bhd.	0	0	0	0
6	MCEMENT	Lafarge Malaysia Bhd.	63	0	28	91
7	RSAWIT	Rimbunan Sawit Bhd.	0	0	0	0
8	SOP	Sarawak Oil Palms Bhd.	199	86	0	285
9	TOYOINK	Toyo Ink Group Bhd.	0	0	0	0
10	PETGAS	Petronas Gas Bhd.	261	26	20	307

Tabel 4.3: Data Pengungkapan Informasi Air di Thailand

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Variabel Dependen			Total
			Pengungkapan Informasi Air			
			GRI 303-1	GRI 303-2	GRI 303-3	
1	BCT	Thai Carbon Black Public Co. Ltd.	163	81	155	399
2	CBG	Carabao Group Public Co. Ltd.	0	0	0	0
3	CPI	Chumporn Palm Oil Industry Public Co. Ltd.	0	0	0	0
4	PG	People's Garment Public Co. Ltd.	212	37	0	249
5	TPCORP	Textile Prestige Public Co. Ltd.	29	0	7	36
6	UT	Union Textile Industries Public Co. Ltd.	39	0	0	39
7	UMS	Unique Mining Services Public Co. Ltd.	0	0	0	0

8	UPOIC	United Palm Oil Industry Public Co. Ltd.	0	0	0	0
9	VPO	Vichitbhan Palmoil Public Co. Ltd.	0	0	36	0
10	YUASA	Yuasa Battery Public Co. Ltd.	0	0	0	0

Tabel 4.4: Data Pengungkapan Informasi Air di Filipina

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Variabel Dependen			Total
			Pengungkapan Informasi Air			
			GRI 303-1	GRI 303-2	GRI 303-3	
1	APX	Apex Mining Co. Inc.	0	0	0	0
2	AT	Atlas Consolidated Mining & Development Corp.	107	0	18	125
3	BSC	Basic Energy Corp.	0	0	0	0
4	PPC	Pryce Corp.	0	0	0	0
5	EEI	EEI Corp.	37	0	0	37
6	SCC	Semirara Mining & Power Corp.	24	24	71	119
7	MVC	Mabuhay Vinyl Corp.	0	0	0	0

8	MWC	Manila Water Company Inc.	78	187	0	265
9	MARC	Marcventures Holdings Corp.	0	0	0	0
10	SHLPH	Pilipinas Shell Petroleum Corp.	157	50	0	207



LAMPIRAN 5

Data Ukuran Perusahaan

Tabel 5.1: Data Ukuran Perusahaan di Indonesia

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Ukuran Perusahaan (dalam ribuan USD)
1	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk	2016	433,068
			2017	470,295
			2018	456,796
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	2016	2,220,361
			2017	2,204,338
			2018	2,288,627
3	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	2016	1,794,128
			2017	1,831,332
			2018	1,845,459
4	PTBA	PT Bukit Asam Tbk	2016	1,375,751
			2017	1,614,826
			2018	1,661,027
5	INDR	PT Indo-Rama Synthetics Tbk	2016	846,568
			2017	800,108
			2018	805,918
6	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	2016	341,595
			2017	447,719
			2018	650,067
7	PBRX	PT Pan Brothers Tbk	2016	519,506
			2017	573,351
			2018	579,066
8	SSTM	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk	2016	49,689
			2017	44,480
			2018	38,629
9	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	2016	700,517
			2017	715,656
			2018	689,706
10	APLI	PT Asiaplast Industries Tbk	2016	23,288
			2017	29,281
			2018	34,575

Tabel 5.2: Data Ukuran Perusahaan di Malaysia

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Ukuran Perusahaan (dalam ribuan USD)
1	BSTEAD	Boustead Plantations Bhd.	2016	723,813
			2017	702,299
			2018	1,007,928
2	BPPLAS	BP Plastics Holdings Bhd.	2016	53,677
			2017	54,877
			2018	55,129
3	CCM	Chemical Company of Malaysia Bhd.	2016	374,476
			2017	212,239
			2018	139,200
4	ENGTEX	Engtex Group Bhd.	2016	277,711
			2017	351,652
			2018	330,616
5	GASMSIA	Gas Malaysia Bhd.	2016	494,487
			2017	567,936
			2018	609,923
6	MCEMENT	Lafarge Malaysia Bhd.	2016	945,648
			2017	1,073,224
			2018	1,035,019
7	RSAWIT	Rimbunan Sawit Bhd.	2016	355,550
			2017	361,860
			2018	293,126
8	SOP	Sarawak Oil Palms Bhd.	2016	962,859
			2017	1,053,032
			2018	998,412
9	TOYOINK	Toyo Ink Group Bhd.	2016	71,551
			2017	96,052
			2018	102,178
10	PETGAS	Petronas Gas Bhd.	2016	3,678,217
			2017	4,343,424
			2018	4,458,235

Tabel 5.3: Data Ukuran Perusahaan di Thailand

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Ukuran Perusahaan (dalam ribuan USD)
1	BCT	Thai Carbon Black Public Co. Ltd.	2016	473,706
			2017	590,387
			2018	559,477
2	CBG	Carabao Group Public Co. Ltd.	2016	272,819
			2017	385,613
			2018	443,917
3	CPI	Chumporn Palm Oil Industry Public Co. Ltd.	2016	133,637
			2017	138,958
			2018	141,000
4	PG	People's Garment Public Co. Ltd.	2016	51,258
			2017	54,765
			2018	51,782
5	TPCORP	Textile Prestige Public Co. Ltd.	2016	72,435
			2017	85,124
			2018	84,421
6	UT	Union Textile Industries Public Co. Ltd.	2016	27,688
			2017	31,114
			2018	33,565
7	UMS	Unique Mining Services Public Co. Ltd.	2016	26,998
			2017	22,594
			2018	26,221
8	UPOIC	United Palm Oil Industry Public Co. Ltd.	2016	43,171
			2017	46,819
			2018	42,201
9	VPO	Vichitbhan Palmoil Public Co. Ltd.	2016	47,672
			2017	45,765
			2018	38,271
10	YUASA	Yuasa Battery Public Co. Ltd.	2016	29,728
			2017	35,829
			2018	38,006

Tabel 5.4: Data Ukuran Perusahaan di Filipina

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Ukuran Perusahaan (dalam ribuan USD)
1	APX	Apex Mining Co. Inc.	2016	223,796
			2017	249,405
			2018	239,158
2	AT	Atlas Consolidated Mining & Development Corp.	2016	1,492,762
			2017	1,532,699
			2018	1,523,740
3	BSC	Basic Energy Corp.	2016	14,565
			2017	15,496
			2018	15,057
4	PPC	Pryce Corp.	2016	173,800
			2017	198,691
			2018	216,388
5	EEI	EEI Corp.	2016	408,102
			2017	440,681
			2018	428,880
6	SCC	Semirara Mining & Power Corp.	2016	1,328,361
			2017	1,413,085
			2018	1,357,034
7	MVC	Mabuhay Vinyl Corp.	2016	36,017
			2017	39,808
			2018	49,637
8	MWC	Manila Water Company Inc.	2016	1,726,683
			2017	2,111,134
			2018	2,340,386
9	MARC	Marcventures Holdings Corp.	2016	68,383
			2017	109,511
			2018	111,341
10	SHLPH	Pilipinas Shell Petroleum Corp.	2016	1,426,306
			2017	1,686,666
			2018	1,531,177

LAMPIRAN 6

Data Kinerja Ekonomi

Tabel 6.1: Data Kinerja Ekonomi di Indonesia

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Kinerja Ekonomi (ROA-2 years Average)
1	AGII	PT Aneka Gas Industri Tbk	2016	1.20%
			2017	1.59%
			2018	1.70%
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	2016	0.22%
			2017	0.45%
			2018	2.67%
3	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	2016	9.36%
			2017	8.56%
			2018	5.66%
4	PTBA	PT Bukit Asam Tbk	2016	11.56%
			2017	22.33%
			2018	21.48%
5	INDR	PT Indo-Rama Synthetics Tbk	2016	0.18%
			2017	0.27%
			2018	7.73%
6	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	2016	6.83%
			2017	6.17%
			2018	5.03%
7	PBRX	PT Pan Brothers Tbk	2016	2.76%
			2017	1.43%
			2018	2.82%
8	SSTM	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk	2016	-2.12%
			2017	-3.76%
			2018	0.18%
9	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	2016	6.56%
			2017	7.92%
			2018	3.20%
10	APLI	PT Asiaplast Industries Tbk	2016	8.16%
			2017	-0.34%
			2018	-5.06%

Tabel 6.2: Data Kinerja Ekonomi di Malaysia

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Kinerja Ekonomi (ROA-2 years Average)
1	BSTEAD	Boustead Plantations Bhd.	2016	6.22%
			2017	22.17%
			2018	0.82%
2	BPPLAS	BP Plastics Holdings Bhd.	2016	7.75%
			2017	5.83%
			2018	9.40%
3	CCM	Chemical Company of Malaysia Bhd.	2016	-4.79%
			2017	3.34%
			2018	4.23%
4	ENGTEX	Engtex Group Bhd.	2016	5.02%
			2017	4.35%
			2018	0.92%
5	GASMSIA	Gas Malaysia Bhd.	2016	7.45%
			2017	9.01%
			2018	7.44%
6	MCEMENT	Lafarge Malaysia Bhd.	2016	1.76%
			2017	-5.17%
			2018	-7.32%
7	RSAWIT	Rimbunan Sawit Bhd.	2016	-4.55%
			2017	-10.70%
			2018	-10.98%
8	SOP	Sarawak Oil Palms Bhd.	2016	3.79%
			2017	6.32%
			2018	1.60%
9	TOYOINK	Toyo Ink Group Bhd.	2016	0.29%
			2017	-2.25%
			2018	0.22%
10	PETGAS	Petronas Gas Bhd.	2016	10.99%
			2017	11.16%
			2018	10.49%

Tabel 6.3: Data Kinerja Ekonomi di Thailand

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Kinerja Ekonomi (ROA-2 years Average)
1	BCT	Thai Carbon Black Public Co. Ltd.	2016	5.86%
			2017	13.27%
			2018	12.30%
2	CBG	Carabao Group Public Co. Ltd.	2016	16.45%
			2017	7.49%
			2018	7.18%
3	CPI	Chumporn Palm Oil Industry Public Co. Ltd.	2016	-0.39%
			2017	0.37%
			2018	-3.09%
4	PG	People's Garment Public Co. Ltd.	2016	-4.27%
			2017	-0.90%
			2018	5.59%
5	TPCORP	Textile Prestige Public Co. Ltd.	2016	11.56%
			2017	4.94%
			2018	2.96%
6	UT	Union Textile Industries Public Co. Ltd.	2016	3.77%
			2017	4.50%
			2018	9.49%
7	UMS	Unique Mining Services Public Co. Ltd.	2016	-6.38%
			2017	-11.30%
			2018	-8.13%
8	UPOIC	United Palm Oil Industry Public Co. Ltd.	2016	4.63%
			2017	-1.26%
			2018	0.98%
9	VPO	Vichitbhan Palmoil Public Co. Ltd.	2016	-12.41%
			2017	-12.91%
			2018	-6.84%
10	YUASA	Yuasa Battery Public Co. Ltd.	2016	11.65%
			2017	10.47%
			2018	10.77%

Tabel 6.4: Data Kinerja Ekonomi di Filipina

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Kinerja Ekonomi (ROA-2 years Average)
1	APX	Apex Mining Co. Inc.	2016	2.84%
			2017	3.73%
			2018	1.87%
2	AT	Atlas Consolidated Mining & Development Corp.	2016	-1.18%
			2017	-2.68%
			2018	-2.15%
3	BSC	Basic Energy Corp.	2016	-15.62%
			2017	-7.98%
			2018	-3.22%
4	PPC	Pryce Corp.	2016	13.49%
			2017	13.83%
			2018	12.91%
5	EEI	EEI Corp.	2016	-3.86%
			2017	4.04%
			2018	2.32%
6	SCC	Semirara Mining & Power Corp.	2016	19.11%
			2017	21.35%
			2018	16.58%
7	MVC	Mabuhay Vinyl Corp.	2016	7.30%
			2017	6.89%
			2018	16.92%
8	MWC	Manila Water Company Inc.	2016	7.26%
			2017	6.59%
			2018	5.67%
9	MARC	Marcventures Holdings Corp.	2016	0.15%
			2017	1.10%
			2018	-6.73%
10	SHLPH	Pilipinas Shell Petroleum Corp.	2016	10.60%
			2017	13.72%
			2018	6.03%